

**HUTAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SEKITAR:
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PRAKTIK
PENGELOLAAN HUTAN PINUS DI DESA KEDUNGURANG
KECAMATAN GUMELAR KABUPATEN BANYUMAS**



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Dakwah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

Oleh :

LAELI NUR WIGATI
NIM : 1617104025

**PROGRAM STUDI PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM
FAKULTAS DAKWAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. KH. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO**

2023

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang Bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Laeli Nur Wigati
Nim : 1617104025
Jenjang : S1
Fakultas : Dakwah
Prodi : Pengembangan Masyarakat Islam

Menyatakan bahwa naskah skripsi berjudul **Hutan Dan Pemberdayaan Masyarakat Sekitar: Partisipasi Masyarakat Dalam Praktik Pengelolaan Hutan Pinus Di Desa Kedungurang Kecamatan Gumelar Kabupaten Banyumas** secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.

Demikian pernyataan ini, apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya siap mempertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Purwokerto, 12 April 2023
Penulis,



Laeli Nur Wigati
NIM.1617104025



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS DAKWAH
Jalan Jenderal A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp. 0281-635624 628250, Fax : 0218-636553, www.uinsaizu.ac.id

PENGESAHAN

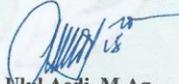
Skripsi Berjudul
HUTAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SEKITAR:
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PRAKTIK
PENGELOLAAN HUTAN PINUS DI DESA KEDUNGURANG
KECAMATAN GUMELARKABUPATEN BANYUMAS

Yang disusun oleh **Laeli Nur Wigati** NIM. 1617104025 Program studi Pengembangan Masyarakat Islam Jurusan Konseling dan pengembangan masyarakat Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Purwokerto, telah diujikan pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Sosial (S.Sos.) dalam pengembangan Masyarakat** oleh sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/Pengimbing


Dr. Ahmad Muttakin, M.Si.
NIP.19791115 200801 018

Sekretaris Sidang/Penguji II


Nini Aedi, M.Ag.
NIP.198705072020121006

Penguji Utama


Muridan, M.Ag.
NIP. 197407182005011006

Mengesahkan,
Purwokerto, 12 April 2023
An. Dekan, Wakil Dekan I



Dr. Muskipul Fuad, M.Ag.
NIP. 197412262000031001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Dakwah
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah melakukan bimbingan telaah, arahan, dan koreksi maka saya sampaikan naskah skripsi saudara:

Nama : Laeli Nur Wigati
Nim : 1617104025
Jenjang : S1
Jurusan : Konseling dan Pengembangan Masyarakat
Program Studi : Pengembangan Masyarakat Islam
Judul Skripsi : **HUTAN DAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT SEKITAR: PARTISIPASI
MASYARAKAT DALAM PRAKTIK PENGELOLAAN
HUTAN PINUS di DESA KEDUNGURANG
KECAMATAN GUMELAR KABUPATEN BANYUMAS**

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat disajikan kepada Dekan Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk diuji dalam rangka memperoleh gelar sarjana dalam Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam (S.Sos), demikian atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Purwokerto, 13 Januari 2023
Pembimbing,



Dr. Ahmad Muttaqin, S.Ag, M.Si
NIP.19791115 200801 018

MOTO

*Maka sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan,
(Q.S. Al-Insyirah: 5)*



**HUTAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SEKITAR:
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PRAKTIK PENGELOLAAN
HUTAN PINUS DI DESA KEDUNGURANG KECAMATAN GUMELAR
KABUPATEN BANYUMAS**

**Laeli Nur Wigati
NIM. 1617104025**

Abstrak

Hutan merupakan sumberdaya alam yang kaya akan manfaat, dengan melalui program perhutanan sosial yang memiliki tujuan untuk kesejahteraan sosial dan untuk pemberdayaan masyarakat agar masyarakat memiliki kemandirian baik dari segi ekonomi, pendidikan maupun sosial. Dalam hal ini kesejahteraan masyarakat kawasan hutan dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Obyek dalam penelitian ini adalah pemberdayaan yang melibatkan masyarakat dalam pengelolaan hutan. Adapun tujuan penelitian ini ialah untuk mengeksplor konsep pengelolaan hutan untuk pemberdayaan dan kesejahteraan sosial melalui partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan pinus.

Hasil dari penelitian ini adalah suatu program perhutanan sosial yang dilakukan untuk memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat berupa tanaman tumpangsari, dan pemanfaatan tanaman industri dengan melakukan penyadapan getah pinus. Adapun bentuk dari partisipasi masyarakat melalui lembaga masyarakat desa hutan terkait dengan perawatan tanaman pinus mulai dari penyemaian hingga pinus masa sadap.

Kata kunci: Hutan, pemberdayaan masyarakat, partisipasi masyarakat dan pengelolaan hutan

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT atas segala hidayah dan inayah-Nya, sehingga dapat menyusun Tugas akhir ini. Skripsi ini dibentuk untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana. Dalam penelitian ini, ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Orang tua tercinta Bapak Disman dan Ibu Daryati, serta saudara kandung saya Sultoni dan istri Khikmatul Khasanah. Ucapan terimakasih atas segala kasih sayang, semangat, do'a, dukungan dan perhatiannya sehingga penulis dapat menyelesaikan studi.
2. Manusia yang selalu menemani, memberikan motivasi dan dukungan yaitu Suami tercinta Sutarso dan anak tersayang Wihdatil Mahabbati Rusula.
3. Almamaterku tercinta, UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Teman-teman prodi Pengembangan Masyarakat Islam (PMI) 2016.



KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillahirobbil'alamin, atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayahNya sehingga penelitian dapat menyelesaikan tugas akhirnya. Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah membawa zaman kegelapan menuju jalan yang terang benderang seperti ini.

Pada penelitian ini, peneliti menulis skripsi dengan judul "HUTAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT: PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PRAKTIK PENGELOLAAN HUTAN PINUS DI DESA KEDUNGURANG KECAMATAN GUMELAR". Oleh sebab itu, peneliti mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. KH. Moh. Roqib, M.Ag., selaku Rektor UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Prof. Dr. H. Abdul Basit, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Dakwah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Ibu Nur Azizah, S.Sos., M.Si., selaku Ketua Jurusan Konseling dan Pengembangan Masyarakat Fakultas Dakwah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Bapak Agus Sriyanto, M.Si., selaku Sekretaris Jurusan Konseling dan Pengembangan Masyarakat Fakultas Dakwah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
5. Bapak Imam Alfi, M.Si., selaku Koordinator Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Bapak Nawawi M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Akademik.
7. Dr. Ahmad Muttaqin, M.Si. selaku pembimbing Skripsi. Terimakasih atas bimbingan, arahan, motivasi dan masukannya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan maksimal.

8. Segenap Dosen dan Jajaran Staf Administrasi Fakultas Dakwah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. Ketua LMDH dan Masyarakat Pengelola Hutan Pinus desa Kedungurang yang telah membantu penulis dalam penelitian.
10. Mandor Perhutani yang telah membantu penulis dalam penelitian

Purwokerto, 13 Januari 2023

Yang Menyatakan



Laeli Nur Wigati
NIM. 1617104025



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	I	
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	II	
HALAMAN PENGESAHAN	III	
HALAMAN NOTA DINAS PEMBIMBING	IV	
HALAMAN MOTTO	V	
HALAMAN ABSTRAK	VI	
HALAMAN PERSEMBAHAN	VII	
KATA PENGANTAR	VIII	
DAFTAR ISI	X	
BAB I	PENDAHULUAN	
A.	Latar Belakang Masalah	1
B.	Penegasan Istilah	6
C.	Rumusan Masalah	9
D.	Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
E.	Kajian Pustaka	11
F.	Sistematika Penulisan	14
BAB II	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PRAKTIK PENGELOLAAN HUTAN	
A.	Hutan	15
1.	Konsep hutan	15
2.	Jenis-jenis hutan	16
B.	Pemberdayaan Masyarakat	17
1.	Konsep Pemberdayaan Masyarakat	17
2.	Tahapan Pemberdayaan Masyarakat	18
3.	Aspek Pemberdayaan Masyarakat	19
4.	Tujuan pemberdayaan Masyarakat	20
5.	Strategi pemberdayaan masyarakat	22
C.	Partisipasi Masyarakat	23

	1. Konsep Partisipasi Masyarakat	23
	2. Tipologi Partisipasi Masyarakat	24
	3. Faktor pendorong berpartisipasi	26
	D. Pengelolaan Hutan	27
	1. Konsep Pengelolaan Hutan	27
	2. Tujuan Pengelolaan Hutan	28
	E. Perhutanan Sosial	30
	F. Konsep Partisipasi Masyarakat Terhadap Perhutanan Sosial	33
BAB III	METODE PENELITIAN	
	A. Jenis Penelitian	35
	B. Tempat Dan Waktu Penelitian	36
	C. Sumber Data.....	36
	D. Teknik Pengumpulan Data.....	37
	E. Teknik Analisis Data	38
BAB IV	PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
	A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	40
	1. Letak geografis desa kedungurang	40
	2. Gambaran demografi desa kedungurang.....	40
	B. Pengelolaan hutan oleh lembaga masyarakat desa hutan	44
	1. Terbentuknya LMDH Wana Makmur	44
	2. Tujuan LMDH Wana Makmur	45
	3. Syarat menjadi anggota LMDH Wana Makmur.....	45
	4. Susunan kepengurusan LMDH Wana Makmur	46
	5. Proses pelaksanaan pengelolaan hutan	49
	6. Kendala dalam pengelolaan hutan	50
	C. Pengelolaan hutan untuk pemberdayaan masyarakat	51
	1. Bentuk pengelolaan hutan untuk pemberdayaan masyarakat ..	51
	2. Perubahan pendapatan masyarakat pengelola hutan.....	55
	D. Partisipasi Masyarakat dalam pengelolaan hutan.....	58

E. Analisis pengelolaan hutan untuk pemberdayaan masyarakat..... 62

F. Analisis partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan..... 65

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan..... 67

B. Saran 67

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengelolaan hutan yang ada di Indonesia telah lama menghadapi tantangan yang kompleks karena interaksinya dengan aspek sosial ekonomi lokal. Belum kokohnya pondasi perekonomian pedesaan menimbulkan ketergantungan warga desa terhadap sumber daya hutan yang cukup tinggi. Banyaknya jumlah desa yang berbatasan dengan kawasan hutan menyebabkan interaksi yang cukup kuat antara masyarakat dengan hutan.¹ Dikarenakan masyarakat sekitar hutan sudah terbiasa dengan mengelola hutan dan mengandalkan sumber daya dari hutan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Dari masa primitif, saat manusia hidup berdampingan dengan alam, hingga masa industrialisasi, pertumbuhan sangat pesat mencapai puncaknya pada abad ke-19, bentuk hubungan yang terjalin antara manusia dan lingkungan telah dilalui. Dalam 20-an, terdapat berbagai hal yang bertentangan dengan pelestarian (Siregar: 2004).

Untuk Meraih kesejahteraan bukan sekedar berjuang memberantas kemiskinan secara cepat dengan modal mengeksploitasi alam secara besar-besaran. Tanpa disadari bahwa menurunnya kualitas alam akan memperbanyak garis kemiskinan. Degradasi lingkungan cenderung menyengsarakan kaum miskin, dikarenakan degradasi ini menyebabkan kerugian bagi kehidupan manusia yang kerap menggantungkan diri dari sumber daya alam untuk memperoleh pendapatan sehari-hari, tidak sedikit kemungkinan nilai manfaatnya dari adanya degradasi lingkungan yang bisa tergantikan dengan aset-aset lain. Dalam jangka panjang, pendekatan pertumbuhan yang menjadi perhatian pada kualitas lingkungan dan efisiensi penggunaan sumber daya akan memberikan

¹ Adi Widyanto, Sri Mulatsih, dan Lina Karlinasari, "Pemberdayaan masyarakat dalam pelestarian hutan dan pertanian berkelanjutan di sekitar Suaka Margasatwa Karakelang, Sulawesi Utara" dimuat dalam *Journal of natural resources and environmental management*, E-ISSN:2460-5824, hlm 1019.

kontribusi terhadap akumulasi, investasi, pertumbuhan ekonomi, serta kesejahteraan manusia.² Degradasi lingkungan merupakan kondisi dimana lingkungan yang alami mengarah pada kerusakan alam dan juga membahayakan kesehatan dari lingkungan. kejadian disebabkan karena ulah manusia yang telah melakukan eksploitasi terhadap hutan, tidak disadari itu akan menimbulkan dampak yang buruk terhadap lingkungan dan juga keasrian dari hutan.

Pembangunan Indonesia yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dilakukan secara berkesinambungan. Salah satunya dengan usaha pemanfaatan sumber daya alam yaitu dengan kekayaan hasil hutan yang dapat dijadikan media atau sarana membuka lapangan pekerjaan untuk memberikan nilai tambah terhadap pendapatan masyarakat. Hutan menjadi salah satu sumber kekayaan negara dan bangsa, baik dilihat dalam aspek ekonomi, sosial budaya dan lingkungan. salah satu cara untuk memajukan daerahnya masing-masing dengan memanfaatkan sumber daya alam disektor kehutanan.³

Pemanfaatan sumber daya hutan ditujukan untuk memperoleh manfaat yang optimum. Pengelolaan hutan yang dilakukan baik oleh masyarakat maupun pemerintah dan swasta tidak bisa dipisahkan dari tujuan pembangunan nasional yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat menjadi tolak ukur dari keberhasilan pengelolaan sumber daya yang ada di hutan selalu diutamakan walau terkadang sering mengabaikan bahkan mengorbankan lingkungan. salah satu kawasan hutan yang harus tetap dijaga kelestarian fungsi utama hutan.⁴ Adapun tanaman hutan pada hutan produksi yang dibangun oleh kelompok masyarakat untuk membangun kualitas dan potensi dari

² M. Firmansyah dan Diah Setyorini Gunawan, “Antara pembangunan ekonomi dan degradasi lingkungan” dimuat dalam *Jurnal Eko- Regional*, Vol.2, No. 2, September 2007, hlm. 107.

³Andi Pratiwi Muliawan, Syarifah Balkis, “Pengaruh kontribusi pendapatan penyadap getah pinus terhadap kesejahteraan ekonomi di desa bolli kecamatan ponre kabupaten bone”, Dimuat dalam *Jurnal Social Landscape*, ISSN 123-4567 tahun 2020, hlm. 1-2.

⁴Mersiana Sahureka, “pemanfaatan lahan dan pengelolaan sumberdaya hutan oleh masyarakat sekitar kawasan hutan lindung gunung sirimau (studi kasus di desa hukurila kota ambon) dimuat dalam *jhppk*, ISSN ONLINE2621-878, 2016, hlm. 2

hutan produksi dengan menerapkan silvikultur⁵ dalam menjamin kelestarian sumber daya dari hutan.

Dalam upaya menjaga kelestarian hutan dari kerusakan, maka diperlukan adanya pengelolaan hutan dari beberapa pihak baik dari masyarakat, pemerintah ataupun dari pihak yang lainnya. Adapun tujuan pengelolaan hutan adalah untuk menjaga kelestarian dari hutan karena memiliki potensi sumber daya alam yang sangat menguntungkan dan berdampak positif terhadap kehidupan manusia. Dalam melakukan pengelolaan hutan diperlukan adanya partisipasi dari masyarakat untuk menjaga hutan dengan pengelolaan berbasis kemasyarakatan, berdasarkan pada kondisi setempat, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan hutan tersebut diolah atau dikelola oleh masyarakat itu sendiri dan masyarakat sendiri yang mengambil keputusan dalam proses pengelolaan sumberdaya yang menurut mereka menguntungkan untuk kedepannya.

Dalam proses pengelolaan hutan diperlukan adanya partisipasi dari masyarakat sekitar, karena dalam pengelolaan hutan perhutani melibatkan langsung peran serta dari masyarakat yang tinggal di sekitar hutan. agar lebih mudah terpantau dalam kelestarian hutan, agar tidak terjadi hal-hal yang menyebabkan kerusakan dari hutan. dikarenakan masyarakat sekitar lah yang dilibatkan untuk bertanggung jawab dalam kelestarian hutan.

Masyarakat sekitar hutan hidupnya bergantung terhadap hutan (sebagai tempat tinggal, sumber pangan, aktivitas religi, dan aktivitas lainnya). Pengelolaan hutan lestari yang dilakukan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama dalam meningkatkan kesejahteraanya, keseimbangan lingkungan dan juga dinamika sosial budaya

⁵*Silvikultur* adalah praktik pengendalian proses permudaan (penanaman), pertumbuhan, komposisi, kesehatan, dan kualitas dari hutan demi mencapai aspek-aspek ekologi dan ekonomi yang diharapkan. Berfokus pada perawatan tegakan hutan dalam menjamin suatu produktivitas.

dalam bentuk hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, hutan rakyat, hutan adat dan kemitraan kehutanan.⁶

Undang-undang nomor 23 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan kehutanan menyatakan bahwa kehutanan merupakan sistem pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu. Adapun perhutanan sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak atau hutan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahterannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk hutan Desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, hutan adat dan kemitraan hutan.⁷ Peraturan ini bukan serta merta memiliki makna bahwa segala yang ada di hutan boleh dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar hutan secara bebas dan tanpa batasan, akan tetapi harus tetap mematuhi peraturan berdasarkan pada fungsi yang dijelaskan dalam undang-undang, tujuannya agar hutan tidak mengalami kerusakan yang nantinya akan berakibat pada kelangsungan hidup manusia khususnya masyarakat sekitar hutan. Pelaku utama dalam pengelolaan hutan adalah masyarakat setempat yang ada di dalam kawasan hutan.

Desa Kedungurang merupakan daerah pegunungan dengan kategori desa berkembang dan klasifikasi desa termasuk desa besar dengan luas wilayah 1.696.033 m². dengan jarak pusat pemerintahan kecamatan 7 km dan jarak dari pusat pemerintahan kota dan jarak dari kota/ibukota kabupaten sekitar 28 km. mayoritas masyarakat desa Kedungurang berprofesi sebagai petani yang mana sumber mata pencaharian bersumber dari hasil panen dari tanaman yang ditanam dengan komoditas unggulan berdasarkan luas tanah dan berdasarkan nilai

⁶ Indah Novita Dewi, "kemiskinan masyarakat sekitar hutan dan program perhutanan sosial", dimuat dalam *Jurnal Info Teknis EBONI*, vol. 15, no. 2, desember 2018, hlm 70.

⁷ Undang-undang no 23 tahun 2021 pasal 1 dan 64.

ekonomi bersumber dari palawija yaitu kapulaga.⁸ Pemanfaatan lahan kosong ditengah pohon pinus bertani Palawija. Kegiatan ini memberikan dampak positif pada ekonomi masyarakat. Tanaman palawija dikerjakan oleh masyarakat secara bersamaan dengan pengelolaan pinus. Pada praktiknya, tanaman palawija bisa dijadikan solusi dalam peningkatan produksi pinus dan peningkatan ekonomi masyarakat yang bekerja sebagai penyadap getah tersebut.⁹

Hutan yang ada di desa Kedungurang ditanami pepohonan pinus. Masyarakat menggantungkan hidupnya dengan memanfaatkan sumberdaya hutan. Masyarakat pengelola lahan memiliki pendapatan dari hutan melalui tanaman jangka pendek, jangka menengah dan juga jangka panjang, seperti; tanaman umbi-umbian, palawija, dan juga hasil dari penyadapan getah pinus. Dalam pelaksanaan program perhutanan sosial di desa Kedungurang dilaksanakan langsung oleh LMDH Wana Makmur yang bermitra dengan Perum perhutani sebagai pengelola program perhutanan sosial. Perhutani mengadakan pertemuan bersama petani penyadap setiap dua minggu sekali, sekaligus melakukan pengangkatan getah dengan harga getah Rp. 4000/kg. setiap 2 minggu sekali mendapat 400kg. banyak sedikitnya getah yang disadap tergantung dari banyaknya pohon yang ditanam. Adapun lahan yang dikelola untuk tanaman palawija berupa kapulaga lokal, dengan masa panen satu bulan sekali. Dengan sistem tanaman tumpangsari atau tanaman dibawah tegakan. masyarakat meningkat penghasilannya terlihat dari hasil tanaman yang telah dikelolanya sendiri. Dengan adanya pemanfaatan pengelolaan lahan disini masyarakat sangat terbantu dengan sistim hutan yang berbasis kemasyarakatan.¹⁰

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti melakukan penelitian terkait hutan dan pemberdayaan masyarakat sekitar: partisipasi masyarakat dalam praktik

⁸Profil desa Kedungurang

⁹ Siti Ikramatoun, Khairulyadi dan Riduan, "Pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan hutan pinus di Kecamatan Linge Aceh Tengah", Dimuat dalam *Jurnal Sosiologi Agama Indonesia*, Vol. 1, November 2020, hlm. 8.

¹⁰ Bapak Solihin, selaku pengelola lahan , Wawancara 13 Juli 2021 pukul 19.00.

pengelolaan hutan pinus, masyarakat yang menggantungkan hidupnya melalui sumberdaya hutan dengan memanfaatkan sumberdaya hutan dengan cara sesuka hati, sehingga hasil yang diperoleh tidak maksimal dan dapat mengancam fungsi kelestarian hutan itu sendiri. yang mana fungsi utama dari adanya perhutanan sosial adalah untuk mensejahterakan masyarakat sekitar hutan dengan tidak merusak kelestarian dari hutan tersebut. Fenomena diatas sangatlah penting untuk diteliti. Dan penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait fenomena tersebut dengan judul **“HUTAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SEKITAR: PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PRAKTIK PENGELOLAAN HUTAN PINUS di DESA KEDUNGURANG KECAMATAN GUMELAR KABUPATEN BANYUMAS”**.

B. Penegasan Istilah

Dalam hal ini Untuk menghindari adanya kesalahpahaman dalam menafsirkan isi skripsi ini, maka penulis terlebih dahulu akan menjelaskan mengenai istilah-istilah utama pada judul Skripsi Penulis.

1. Hutan

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999, hutan merupakan suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak bisa dipisahkan. Berdasarkan fungsi dari hutan, hutan dibagi menjadi tiga kelompok yaitu hutan lindung, hutan produksi dan hutan konservasi.¹¹ Adapun yang dimaksud peneliti adalah hutan produksi karena berfungsi untuk menghasilkan atau memproduksi hasil hutan. adapun salah satu hasil dari hutan pada umumnya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat yang ada di sekitar hutan.

¹¹Rahajeng Kusumaningtyas dan Ivan Chofyan, “*pengelolaan hutan dalam mengatsi alih fungsi lahan hutan di wilayah kabupaten subang*” dimuat dalam *Jurnal Perencanaan wilayah kota*, vol. 13 no. 2, hlm. 2.

2. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan (*Empowerment*) berasal dari kata dasar daya (*power*) yang mempunyai arti kemampuan atau kekuatan. Sedangkan menurut kamus bahasa Indonesia (KBBI) pemberdayaan merupakan sebuah proses, cara, perbuatan memberdayakan, secara umum pemberdayaan merupakan suatu proses memberikan daya (*power*) bagi suatu komunitas atau kelompok masyarakat untuk bertindak mengatasi masalahnya, serta mengangkat taraf hidup dan kesejahteraan.¹² Pemberdayaan merupakan sebuah proses manusia menjadi cukup kuat untuk ikut serta berpartisipasi dalam suatu kejadian serta lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan lebih menekankan pada manusia untuk memperoleh keterampilan, berwawasan, dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi daya tarik (Parsons, 1994:106).¹³ Pemberdayaan lebih menitik beratkan pada ide-ide manusia yang membuat dirinya menjadi lebih maju dan tidak tergantung sepenuhnya dengan orang lain, atau menjadikan manusia bisa mandiri dengan apa yang diri sendiri bisa lakukan.

Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses dalam pengembangan kesempatan, kemauan dan kemampuan masyarakat untuk mendapatkan akses terhadap sumberdaya. sehingga meningkatnya kapasitas untuk menentukan masa depan sendiri dengan ikut berpartisipasi dalam mempengaruhi dan mewujudkan kualitas kehidupan diri dalam komunitasnya.¹⁴

terkait dengan penelitian ini, pemberdayaan masyarakat yang penulis maksud adalah untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat

¹² Ulfi Putra Sany, “Prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat dalam persepektif Al-Qur’an”, Dimuat dalam *Jurnal Ilmu Dakwah*, Vol. 39, No. 1, tahun 2019, hlm. 3.

¹³Siti Ikramatoun, Khairulyadi dan Riduan, “Pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan hutan pinus di Kecamatan Linge Aceh Tengah”,Dimuat dalam *Jurnal Sosiologi Agama Indonesia*, Vol. 1, November 2020, hlm. 4.

¹⁴ Kiki Endah, “Pemberdayaan masyarakat : menggali potensi lokal desa”, dimuat dalam *Jurnal Moderat*, vol. 6, no.1. februarai 2020, hlm. 3.

sekitar hutan untuk memperoleh manfaat dari hutan melalui pengembangan potensi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan. suatu perolehan meningkatnya pendapatan dari petani penyadap getah pinus dalam memenuhi kebutuhan keluarganya melalui selain bekerja menjadi penyadap getah pinus milik perum Perhutani, petani penyadap juga memperoleh sebagian lahan untuk ditanami palawija berupa kapulaga yang mana hasil panen dari tanaman tersebut diperoleh untuk menambah kebutuhan rumah tangga dari penyadap getah pinus tersebut karena mayoritas masyarakat Kedungurung memiliki kemampuan dalam bertanam palawija berupa kapulaga.

3. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi menurut Keith Davis juga diungkapkan oleh Winardi (1990: 202) adalah ikut sertanya seseorang, baik secara mental ataupun secara emosional dalam memberikan sumbangsih terhadap proses pembuatan keputusan, terutama pada suatu permasalahan terkait keterlibatan pribadi seseorang untuk melaksanakan tanggung jawabnya dalam melaksanakan hal tersebut. Partisipasi masyarakat menurut Isbandi (2007: 27) yaitu keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian suatu masalah dan potensi yang ada di dalam masyarakat, pemilihan dan juga pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi.¹⁵

Partisipasi dalam pelaksanaan pembangunan. diperlukan karena masyarakatlah yang pada akhirnya akan melaksanakan program tersebut. adanya pelibatan dari masyarakat memungkinkan mereka memiliki rasa tanggung jawab terhadap keberlanjutan program pembangunan,

¹⁵ Shahibah Yuliani, dan Nova Scorviana Herminasari, “Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Hutan Mangrove Di Desa Segarajaya, Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi”, dimuat dalam *Jurnal Green Growth dan manajemen lingkungan*, vol.6 No. 2 Desember 2017, hlm. 46.

diharapkan pendekatan partisipatif tergali potensi dan kreativitas masyarakat. Partisipasi masyarakat yang dimaksud peneliti adalah keikutsertaan masyarakat Dusun Cirangkong dan sekitarnya dalam melakukan pengelolaan lahan yang ada dalam hutan pinus.

4. Pengelolaan Hutan

pengelolaan berasal dari kata kelola yang berarti mengendalikan, menyelenggarakan, mengurus dan menjalankan. Sedangkan pengelolaan merupakan proses, cara, perbuatan mengelola, proses melakukan kegiatan dengan menggerakkan tenaga orang lain, atau suatu proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi, atau proses yang memberikan pengawasan kepada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan suatu kebijaksanaan dan pencapaian tujuan.¹⁶

Pengelolaan hutan yang dimaksud peneliti adalah, suatu tindakan berbasis kemasyarakatan, yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat untuk mengelola dan menjaga kelestarian dengan cara pengawasan pada semua hal yang ada di dalam hutan. Salah satunya, dengan memanfaatkan Lahan yang ada, untuk produksi tanaman yang menguntungkan dengan ditanami palawija berupa kapulaga yang mana dari pengelolaan tersebut petani sangat terbantu ekonominya, terlebih dimasa Pandemi yang sekarang ini, kapulaga memiliki permintaan yang cukup tinggi karena bisa dimanfaatkan menjadi bahan olahan untuk obat-obatan. Sehingga harga kapulaga menjadi lebih ekonomis. dengan begitu masyarakat sekitar hutan pinus meningkat pendapatannya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Konsep Pengelolaan Hutan Untuk Pemberdayaan masyarakat?
2. Bagaimana Praktik Partisipasi Masyarakat Sekitar terhadap Pengelolaan Hutan Pinus?

¹⁶ <https://kbbi.web.id/kelola.html>, diakses pada 1 Juli 2021.

D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang telah disebutkan diatas dapat diketahui Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

- a. Mengeksplorasi konsep pengelolaan hutan untuk pemberdayaan dan kesejahteraan sosial melalui kajian terhadap konsep pengelolaan hutan sosial (*social forestry*).
- b. Melengkapi kajian hutan sosial (*social forestry*) melalui analisis terhadap partisipasi dan kolaborasi pengelolaan hutan pinus.
- c. Mengembangkan model pemberdayaan masyarakat melalui kajian atas praktik pengelolaan hutan sosial di Desa Kedungurang.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

- 1) Penelitian ini diharapkan bisa dijadikan referensi bagi penelitian yang akan datang mengenai pemberdayaan.
- 2) Menjadi alternatif konseptual pemberdayaan masyarakat melalui pendekatan kolaboratif berbasis pada pengelolaan sumber daya alam.
- 3) Memperkuat konsep pengelolaan hutan sosial (*social forestry*) melalui penguatan teknologi partisipasi dan penguatan kapasitas masyarakat.

b. Manfaat Praktis

- 1) menjadi dasar evaluasi bagi praktik pengelolaan hutan untuk memberi nilai tambah produktif-ekonomis bagi masyarakat sekitar kawasan hutan.
- 2) Menjadi kerangka kerjasama pengelolaan hutan yang lebih proporsional dan memberikan keuntungan kepada semua pihak.
- 3) Memperkuat posisi tawaran masyarakat sekitar kawasan hutan untuk memperoleh manfaat yang lebih besar terhadap pengelolaan sumberdaya melalui konsep *social forestry*.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan tinjauan atau pemeriksaan terhadap hasil-hasil tulisan atau penelitian sebelumnya yang sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan. hal ini bertujuan untuk menghindari kesamaan antara penelitian yang mempunyai kaitan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah:

1. Hasil penelitian Skripsi oleh Habibatul Ummah yang berjudul **“Pemberayaan Masyarakat Berbasis Hutan Kemasyarakatan Dalam Upaya Pelestarian Lingkungan Di Desa Karang Jaya Kecamatan Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan”**. penelitian ini membahas tentang pemberdayaan yang dilakukan melalui pengelolaan hutan dan pelatihan hutan kemasyarakatan dalam pelestarian lingkungan yang melibatkan peran serta dari masyarakat agar terciptanya masyarakat yang sejahtera dan memiliki kemandirian.

Adapun upaya pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan hutan dapat dilihat dari tercapainya implementasi dilapangan yaitu memberikan pengetahuan dalam melestarikan hutan sehingga masyarakat dapat mengelola hutan dengan baik dan benar dan juga meningkatnya pendapatan masyarakat kawasan hutan.

Hasil dari pemberdayaan masyarakat pengelola hutan dilihat dari segi ekonomi yang meningkat pendapatan keluarganya, dilihat dari segi pendidikan meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia, dari segi sosial, terciptanya kerjasama dan gotong royong antara masyarakat dalam menjaga dan melestarikan kawasan.¹⁷

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas tentang pemberdayaan masyarakat serta menggunakan metode

¹⁷ Habibatul Ummah, “Pemberayaan Masyarakat Berbasis Hutan Kemasyarakatan Dalam Upaya Pelestarian Lingkungan Di Desa Karang Jaya Kecamatan Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan”, Skripsi: *Pengembangan Masyarakat Islam*, Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi, UIN Raden Intan Lampung, 2021.

penelitian yang sama yaitu field research. Perbedaannya terletak pada objek dan tempat yang berbeda.

2. Hasil penelitian skripsi oleh Sulpiana yang berjudul “**Pengelolaan Sumber Daya Alam (Lada) Berbasis Kearifan Lokal Dipesisir Danau Towuti Kabupaten Luwu Timur**” penelitian ini membahas tentang pengelolaan sumberdaya alam lada dengan tetap menjaga kelestarian hutan yang ada disekitar mereka yang dilakukan oleh masyarakat pesisir danau towuthi dengan melakukan konservasi yang dimana harus menentukan kawasan yang akan dijadikan sebagai lahan perkebunan, dan juga pembangunan berkelanjutan yang mengharapkan masyarakat mampu menjaga sumberdaya alam, dan bertanggung jawab dengan cara selektif dengan menggunakan sumberdaya alam yang sebenar-benarnya untuk kepentingan.

Pengelolaan hutan yang dilakukan dalam penelitian ini dengan menanam tanaman Lada karena mayoritas masyarakat pesisir danau Towuthi berkebun Lada, dengan melakukan upaya pembangunan diantaranya dengan melakukan konservasi, pembangunan berkelanjutan dan juga bertanggung jawab. Bentuk konservasi berupa pelstarian kawasan alam, kawasan suaka alam dan juga taman buru. Adapun bentuk dari pembangunan berkelanjutan dengan menetapkan undang-undang tentang lingkungan hidup yang telah disepakati bersama oleh pemerintah. Dan juga bentuk dari tanggungjawab dengan melalui 4 cara yaitu, harus seimbang antara SDA dengan pembangunan, lebih mementingkan lingkungan, tidak boleh melanggar aturan dan melestarikan SDA.¹⁸

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas tentang pengelolaan sumberdaya alam serta menggunakan metode penelitian yang sama yaitu penelitian kualitatif. Perbedaannya terletak pada

¹⁸ Sulpiana, “Pengelolaan Sumber Daya Alam (Lada) Berbasis Kearifan Lokal Dipesisir Danau Towuti Kabupaten Luwu Timur”. Skripsi: *Ekonomi Syariah*, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, IAIN Palopo, 2019.

objek dan tempat yang berbeda, selain itu dalam pengelolaan sumberdaya alam penelitian ini menanam tanaman lada, sedangkan penelitian penulis tanaman pinus.

3. Hasil penelitian skripsi oleh Dasrul Ramadhan yang berjudul **“Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Hutan Rakyat Di Desa Paccaramengan Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba”**. Penelitian ini membahas tentang tingkat partisipasi masyarakat desa paccaramengan dalam melakukan pengelolaan hutan yang memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Partisipasi yang ada di desa Paccaramengan memiliki tingkat partisipasi yang cukup tinggi dilihat dari keikutsertaan masyarakat dalam mengikuti kegiatan terkait dengan pengelolaan hutan yaitu, partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan juga partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan.

Tingkat partisipasi masyarakat dalam penelitian ini terkait dengan perencanaan meliputi, pembukaan wilayah hutan, pembagian petak kerja, dan pembersihan areal, adapun partisipasi dalam pelaksanaan meliputi pengadaan bibit, partisipasi dalam penanaman, partisipasi dalam penyulaman, dan juga pengamanan areal hutan.¹⁹

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan. perbedaannya adalah terletak pada objek dan tempat yang berbeda, dan juga dalam pendekatan penelitian menggunakan kuantitatif sedangkan dalam penelitian penulis menggunakan metode penelitian kualitatif.

¹⁹ Dasrul Ramadhan yang berjudul “Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Hutan Rakyat Di Desa Paccaramengan Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba”, Skripsi: *Kehutanan*, Fakultas Pertanian, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2016.

F. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam laporan skripsi ini yaitu sebagai berikut:

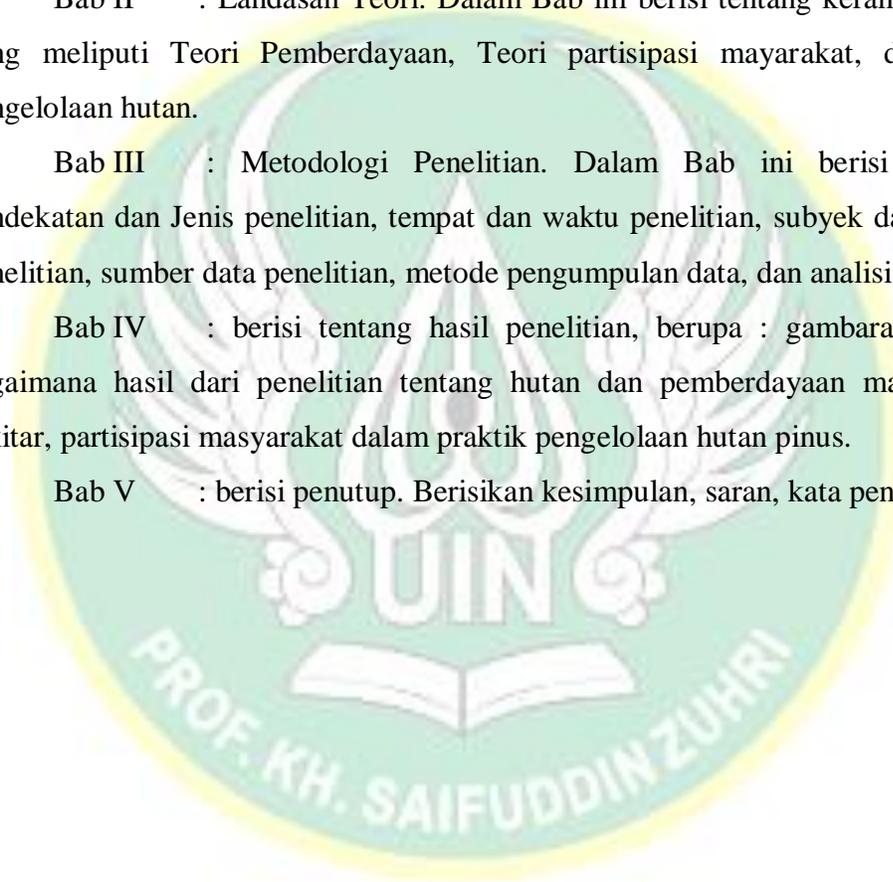
Bab I : pendahuluan. Dalam Bab ini berisi tentang latar Belakang Masalah, penegasan Istilah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, kajian Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan

Bab II : Landasan Teori. Dalam Bab ini berisi tentang kerangka teori yang meliputi Teori Pemberdayaan, Teori partisipasi masyarakat, dan teori pengelolaan hutan.

Bab III : Metodologi Penelitian. Dalam Bab ini berisi tentang pendekatan dan Jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, subyek dan obyek penelitian, sumber data penelitian, metode pengumpulan data, dan analisis data.

Bab IV : berisi tentang hasil penelitian, berupa : gambaran umum bagaimana hasil dari penelitian tentang hutan dan pemberdayaan masyarakat sekitar, partisipasi masyarakat dalam praktik pengelolaan hutan pinus.

Bab V : berisi penutup. Berisikan kesimpulan, saran, kata penutup.



BAB II

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PRAKTIK PENGELOLAAN HUTAN

A. Hutan

1. Konsep Hutan

Hutan dikonsepsikan sebagai “suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan”.

Terdapat tiga ciri hutan, yang meliputi:

- a. Adanya kesatuan ekosistem
- b. Wujudnya, dan
- c. Substansinya.

Ekosistem dikonsepsikan sebagai keanekaragaman suatu komunitas beserta lingkungannya yang berfungsi sebagai suatu kesatuan ekologi di alam. Ekologi dikonsepsikan sebagai suatu ilmu yang mengkaji dan menganalisis tentang hubungan timbal balik antara makhluk dan alam sekitarnya. Wujud hutan berupa hamparan lahan. Hamparan lahan dikonsepsikan sebagai tanah yang rata atau papar. Substansi yang terdapat pada hamparan lahan, berupa sumber daya alam hayati. Sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan.²⁰ Merujuk pendapat Arief, menyimpulkan bahwa hutan merupakan sekumpulan pohon yang tumbuh rapat yang mempunyai peranan penting dalam kehidupan makhluk di bumi.²¹

Hutan merupakan bagian integral dan tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat yang hidup disekitarnya. Hubungan interaksi antara

²⁰ Salim hs, pengantar hukum sumber daya alam, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2018), hlm. 312.

²¹ Idha Choiria, Dkk, Pemberdayaan Masyarakat Desa Hutan Melalui Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Sebagai Upaya Meningkatkan Pendapatan Masyarakat (Studi Pada LMDH Jati Luhur KPH Nganjuk, Dimuat Dalam *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 3, No.12, Hlm. 2114.

masyarakat desa hutan dengan lingkungan alam sekitarnya telah berlangsung selama berabad-abad

Potensi sumberdaya alam yang ada di Indonesia sangat berlimpah, akan tetapi tingkat kerawanan dan kerusakan juga cukup tinggi, dikarenakan manusia melakukan sewenang-wenang terhadap hutan, melalui penebangan tanpa izin dengan melakukan pencurian kayu. Dalam hal ini sebenarnya merugikan diri sendiri. Dikarenakan hutan memiliki manfaat yang sangat besar bagi kehidupan manusia, jika dilakukan perawatan maka hutan akan lestari dan masyarakat sekitar pun ikut terdampak dengan kelestarian hutan dengan memanfaatkan hasil dari hutan tersebut.

2. Jenis-jenis hutan

Sumber kekayaan alam diusahakan agar memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk memenuhi kebutuhan bagi kepentingan masyarakat. Dilakukan dengan cara tidak merusak tata lingkungan hidup, namun dilaksanakan dengan bijaksana dan menyeluruh dengan memperhitungkan kebutuhan generasi yang akan datang.

Hutan ini dapat digolongkan menjadi tiga macam, yaitu hutan konservasi, hutan lindung, dan hutan produksi.²²

- a. Hutan konservasi, merupakan kawasan hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya.
- b. Hutan lindung, merupakan kawasan hutan yang memiliki fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, dan memelihara kesuburan tanah.
- c. Hutan produksi merupakan kawasan hutan yang memiliki fungsi pokok memproduksi hasil hutan.

²² Ahmad Mujaffar, *pemberdayaan Masyarakat dalam pengelolaan hutan*, (Lombok: Forum Pemuda Aswaja, 2020), hlm.8.

B. Pemberdayaan Masyarakat

1. Konsep Pemberdayaan Masyarakat

Konsep pemberdayaan tidak terlepas dari kata daya (kekuatan). Baik dari kekuatan pemikiran, keyakinan, fisik, ekonomi, sosial, politik dan lainnya. Artinya proses dari pemberdayaan ini merupakan proses memberi kekuatan kemampuan dari sebelumnya tidak atau belum kuat menjadi lebih kuat (berdaya). Prinsipnya pemberdayaan merupakan proses menumbuhkan atau menguatkan secara ekonomi, keadilan dan keberdayaan yang berkelanjutan. Pemberdayaan masyarakat merupakan cara meningkatkan, menswadayakan, memperkuat *bargaining position* atau posisi tawar masyarakat pertanian yang stratifikasi sosial dibawah terhadap tekanan, sehingga masyarakat mampu mengambil keputusan atau bertanggungjawab atas putusan tersebut.²³

Pemberdayaan masyarakat ialah proses pembangunan yang membuat masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial dalam memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri. Untuk mengembangkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat yang dilakukan dengan cara meningkatkan pengetahuan, perilaku, keterampilan, sikap, kesadaran, kemampuan, serta pemanfaatan sumberdaya Pemberdayaan masyarakat hanya bisa terjadi apabila masyarakat ikut berpartisipasi, kata kunci dari pemberdayaan adalah *proses pembangunan, masyarakat berinisiatif, memperbaiki situasi kondisi diri sendiri*.²⁴

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk menciptakan atau meningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dalam memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian dan kesejahteraannya. Dengan memberikan ruang gerak

²³ Setiyo Yuli Handono, Kliwon Hidayat, dan Mangku Purnomo, *Pemberdayaan Masyarakat Pertanian*, (Malang: UB Press, 2020), cet. 1, hal. 12.

²⁴ Dedeh Maryani dan Ruth Roselin E. Nainggolan, *Pemberdayaan Masyarakat*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2019), Cet. 1, hal. 8.

dan meningkatkan keterampilan, pengetahuan dan sikap dalam upaya untuk mencapai tujuan yang lebih baik dari yang sebelumnya.²⁵

Menurut Suharto, menyatakan bahwa pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam:²⁶

- a. Memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (*freedom*), dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat, tetapi juga bebas dari kelaparan, kebodohan, dan kesakitan.
- b. Menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan masyarakat dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang dan jasa yang dibutuhkan dan berkualitas.
- c. Berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka.

2. Tahapan Pemberdayaan

Dalam proses pemberdayaan, kegiatan penyuluhan dan pendampingan merupakan kegiatan yang harus dilakukan. Menurut Wrihatnolo dan Dwidjowijoto tahapan pemberdayaan dalam proses pemberdayaan ada 3 yaitu:²⁷

- a. Tahap penyadaran, dalam tahap ini target diberi pencerahan dalam bentuk pemberian penyadaran bahwa mereka mempunyai hak untuk mempunyai sesuatu.
- b. Tahap pengkapasitasan, dalam tahap ini masyarakat yang kurang mampu diberikan kuasa atau daya untuk meningkatkan keterampilan. Proses ini terdiri atas 3 jenis yaitu:

²⁵ Sriyana, *Masalah sosial kemiskinan, pemberdayaan dan kesejahteraan sosial*, (Malang: CV. Literasi nusantara Abadi, 2021), Cet. 1, hal. 102.

²⁶ Hendrawati Hamid, *Manajemen Pemberdayaan Masyarakat*, (Makasar: Della Macca, 2018), Cet. 1, hal. 11

²⁷ Lily Sri Ulina Peranginangin, Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kawasan konservasi, *Jurnal Kebijakan & Administrasi Publik JKAP*, Vol. 18, No. 1, 2014, hal. 70.

- a) Pengkapasitasan manusia dalam arti memampukan manusia, baik dalam konteks individu maupun kelompok, dapat dilakukan melalui pelatihan, *training* atau *workshop*.
 - b) Pengkapasitasan organisasi dilakukan dalam bentuk restrukturisasi organisasi yang hendak menerima daya atau kapasitas tersebut.
 - c) Pengkapasitasan ketiga adalah menyangkut sistem nilai, yang berarti aturan main, dilakukan dengan membantu target memuat aturan main diantara mereka.
- c. Tahap pendayaan pada tahap ini, masyarakat diberikan daya, kekuasaan, otoritas, atau peluang sesuai dengan kualitas kecakapan yang telah dimiliki.

3. Aspek Pemberdayaan

Upaya untuk memberdayakan masyarakat (*empowering*) dapat dikaji dari 3 aspek yaitu:²⁸

- a. *Enabling*, yaitu menciptakan suasana yang memungkinkan potensi masyarakat dapat berkembang. Asumsinya adalah pemahaman bahwa setiap orang, setiap masyarakat mempunyai potensi yang dapat dikembangkan artinya tidak ada orang atau masyarakat tanpa daya. Pemberdayaan merupakan upaya untuk membangun daya dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki masyarakat serta upaya untuk mengembangkannya.
- b. *Empowering*, merupakan memperkuat potensi yang dimiliki masyarakat melalui langkah-langkah nyata yang menyangkut penyediaan berbagai input dan pembukaan dalam berbagai peluang yang akan membuat masyarakat semakin berdaya.

²⁸ Munawar Noor, Pemberdayaan Masyarakat, Dimuat dalam *Jurnal Ilmiah CIVIS*, Vol. 1, No. 2, 2011, Hal. 9.

c. *Protecting*, yakni melindungi dan membela kepentingan masyarakat lemah. Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut diri dan masyarakatnya merupakan unsur penting, sehingga pemberdayaan masyarakat sangat erat hubungannya dengan pementapan, pembudayaan dan pengalaman demokrasi.

4. Tujuan Pemberdayaan

Sebagai kegiatan yang berproses, diharapkan kegiatan pemberdayaan masyarakat dapat meningkatkan kehidupan masyarakat sebagai kelompok sasaran menjadi lebih sejahtera, berdaya atau mempunyai kekuatan dalam memenuhi kebutuhan hidup yang utama, hingga pada akhirnya akan menciptakan kemandirian dalam masyarakat. Tujuan utama dari pemberdayaan adalah memperkuat kekuasaan masyarakat, khususnya kelompok lemah yang memiliki ketidakberdayaan, baik karena kondisi internal, maupun karena kondisi eksternal (ditindas oleh struktur sosial yang tidak berlaku adil).

Menurut Mardikanto dan Poerwoko, tujuan dari pemberdayaan meliputi berbagai upaya perbaikan, yaitu:²⁹

a. Perbaikan pendidikan (*better education*) artinya, pemberdayaan dirancang sebagai suatu bentuk pendidikan yang lebih baik. Perbaikan pendidikan yang dilakukan melalui pemberdayaan tidak hanya terbatas pada perbaikan materi, perbaikan metode, perbaikan menyangkut waktu dan tempat, serta hubungan fasilitator dan penerima manfaat, tetapi seharusnya yang tak kalah pentingnya adalah bagaimana perbaikan pendidikan non formal dalam proses pemberdayaan mampu menumbuhkan semangat dan keinginan untuk terus belajar tanpa batas waktu dan umur.

²⁹ Hendrawati Hamid, *Manajemen Pemberdayaan Masyarakat*, (Makasar: Della Macca, 2018), Cet. 1, hal. 13

- b. Perbaiki aksesibilitas (*better accessibility*) yakni, seiring tumbuh dan berkembangnya semangat belajar sepanjang hayat, diharapkan dapat memperbaiki aksesibilitas, utamanya aksesibilitas terhadap sumber informasi atau inovasi, sumber pembiayaan atau keuangan, penyedia produk peralatan dan lembaga pemasaran.
- c. Perbaiki tindakan (*better action*), bahwa melalui bekal perbaikan pendidikan dan aksesibilitas dengan beragam sumber daya (SDM, SDA dan sumber daya lainnya) yang lebih baik, diharapkan akan melahirkan tindakan-tindakan yang semakin membaik.
- d. Perbaiki kelembagaan (*better institution*), dengan perbaikan kegiatan atau tindakan yang dilakukan, diharapkan dapat memperbaiki kelembagaan masyarakat, terutama pengembangan jejaring kemitraan-usaha, sehingga dapat menciptakan posisi tawar (*bargaining position*) yang kuat pada masyarakat.
- e. Perbaiki usaha (*better business*) yang artinya, perbaikan pendidikan (semangat belajar), perbaikan aksesibilitas, kegiatan, dan perbaikan kelembagaan, diharapkan akan dapat memperbaiki usaha atau bisnis yang dijalankan.
- f. Perbaiki pendapatan (*better income*) bahwa, perbaikan bisnis yang dijalankan, diharapkan akan dapat memperbaiki pendapatan yang diperolehnya, termasuk pendapatan keluarga dan masyarakatnya.
- g. Perbaiki lingkungan (*better environment*) artinya, perbaikan pendapatan dapat memperbaiki lingkungan (fisik dan sosial), karena kerusakan lingkungan seringkali disebabkan karena faktor kemiskinan atau terbatasnya pendapatan.
- h. Perbaiki kehidupan (*better living*) yakni, tingkat pendapatan yang memadai dan lingkungan yang sehat, diharapkan dapat memperbaiki situasi kehidupan setiap keluarga serta masyarakat.

- i. Perbaiki masyarakat (*better community*) bahwa, situasi kehidupan yang lebih baik, dan didukung dengan lingkungan (fisik dan sosial) yang lebih baik, diharapkan dapat mewujudkan kehidupan masyarakat yang juga lebih baik.

5. Strategi Pemberdayaan Masyarakat

Dalam konteks pekerjaan sosial, pemberdayaan dapat dilakukan melalui tiga aras atau matra pemberdayaan yaitu:³⁰

- a. Aras Mikro, pemberdayaan dilakukan terhadap klien secara individu melalui bimbingan, konseling, *stress management*, dan *crisis intervention*. Tujuan utamanya untuk membimbing atau melatih klien dalam menjalankan tugas-tugas kehidupannya. Model ini sering disebut sebagai pendekatan yang berpusat pada tugas.
- b. Aras Mezzo, pemberdayaan dilakukan terhadap sekelompok klien. Pemberdayaan dilakukan dengan menggunakan kelompok sebagai media intervensi. Pendidikan dan pelatihan, dinamika kelompok, biasanya digunakan sebagai strategi dalam meningkatkan kesadaran pengetahuan, keterampilan, dan sikap-sikap klien agar memiliki kemampuan memecahkan permasalahan yang dihadapinya
- c. Aras Makro, pendekatan ini disebut juga sebagai strategi sistem besar (*large system strategy*), karena sasaran perubahan diarahkan pada sistem lingkungan yang lebih luas. Perumusan kebijakan, perencanaan sosial, aksi sosial, pengorganisasian masyarakat, manajemen konflik, merupakan strategi sistem besar memandang klien sebagai orang yang memiliki kompetensi untuk memahami situasi mereka sendiri, dan untuk menentukan strategi yang tepat untuk bertindak.

³⁰ Abu Huaerah dan Mety Melawati, "*pengorganisasian dan pengembangan masyarakat model strategi pembangunan berbasis kerakyatan*", (Indonesia: Humaniora, 2008), Hal. 106.

C. Partisipasi Masyarakat

1. Konsep partisipasi masyarakat

Partisipasi merupakan keterlibatan mental dan emosional orang-orang dalam situasi kelompok, yang mendorong mereka untuk memberikan kontribusi kepada tujuan kelompok, dan berbagi tanggungjawab pencapaian tujuan dalam usaha untuk mencapai tujuan, serta bertanggungjawab terhadap usaha yang bersangkutan.

Definisi partisipasi mengandung beberapa unsur yaitu:³¹

- a. Adanya keterlibatan mental dan emosi, dalam hal ini mengandung arti bahwa aspek mental-emosional yang mencerminkan faktor psikologis lebih menonjol dari pada aktivitas secara fisik dalam menyelesaikan tugas yang dilakukannya.
- b. Adanya dorongan dalam diri seseorang (motivasi) untuk mau memberi sumbangan (kontribusi) baik berupa pikiran, tenaga, dana dan waktu, dalam ini individu diberikan peluang untuk menyalurkan inisiatif dan kreativitasnya bagi kepentingan kelompok. Jadi partisipasi yang tumbuh bukan hanya sekedar kesepakatan antara gagasan manajer dengan penerapan anggota kelompoknya, tetapi lebih dari hal tersebut. mekanisme yang terjadi telah mewujudkan adanya pertukaran sosial dua arah diantara mereka yang terlibat dalam kelompok tersebut, termasuk antara manajer dan anggotanya.
- c. Adanya kesediaan untuk bertanggungjawab terhadap segala kegiatan yang diikutinya. Kondisi yang terjadi adalah, adanya kebersamaan secara spontan dari diri masing-masing anggota yang terlibat untuk mewujudkan kebutuhan bersama. Tumbuhnya rasa tanggung jawab dan rasa memiliki

³¹ Hendrawati Hamid, *Manajemen Pemberdayaan Masyarakat*, (Makasar: Della Macca, 2018), Cet. 1, hal. 148.

merupakan pencerminan terhadap kerja yang dilakukannya, sehingga mencapai keberhasilan yang optimal.

2. Tipologi partisipasi masyarakat

Proses terjadinya partisipasi dilihat dari perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan hasil dan evaluasi. Tahap selanjutnya merupakan melihat tingkatan dan partisipasi masyarakat. Tingkatan partisipasi menurut Arnstein yakni:³²

- a. Manipulasi, tingkatan partisipasi ini merupakan paling rendah, yang memposisikan masyarakat hanya dipakai sebagai pihak yang memberikan persetujuan dalam berbagai badan penasehat. Dalam hal ini tidak ada partisipasi masyarakat yang sebenarnya dan tulus, tetapi diselewengkan dan dipakai sebagai alat publikasi dari pihak penguasa.
- b. Terapi, dengan berkedok melibatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, para ahli memperlakukan anggota masyarakat terlibat dalam kegiatan, pada kenyataannya kegiatan tersebut lebih banyak untuk mendapatkan masukan dari masyarakat demi kepentingan pemerintah.
- c. Informasi, memberikan informasi kepada masyarakat tentang hak-hak mereka, tanggungjawab dan berbagai pilihan, dapat menjadi langkah pertama yang sangat penting dalam pelaksanaan partisipasi masyarakat, meskipun yang sering terjadi adalah pemberian informasi satu arah dari pihak pemegang kekuasaan kepada masyarakat, tanpa adanya kemungkinan untuk memberikan umpan balik atau kekuatan untuk negosiasi dari masyarakat. Dalam hal ini informasi diberikan pada akhir perencanaan, masyarakat hanya memiliki sedikit kesempatan untuk mempengaruhi rencana.

³² Meita Four Liani, Emi Roslinda, dan Sudirman Muin, *Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan adat di dusun sungai utik desa batu lintang kecamatan embaloh hulu kabupaten kapuas hulu*, dalam *Jurnal Hutan Lestari*, Vol. 4, Hal. 3.

- d. Konsultasi, mengundang opini masyarakat, setelah memberikan informasi kepada mereka, dapat merupakan langkah penting dalam menuju partisipasi penuh dari masyarakat. Walaupun telah terjadi dialog dua arah, akan tetapi cara ini tingkat keberhasilannya rendah karena tidak adanya jaminan bahwa kepedulian dan ide masyarakat akan diperhatikan.
- e. Penentraman, masyarakat mulai mempunyai beberapa pengaruh meskipun beberapa hal masih tetap ditentukan oleh pihak yang mempunyai kekuasaan. Dalam pelaksanaannya beberapa anggota masyarakat dianggap mampu dimasukan sebagai anggota dalam badan-badan kerjasama pengembangan kelompok masyarakat yang anggota-anggotanya wakil dari berbagai instansi pemerintah. Walaupun usulan dari masyarakat diperhatikan sesuai dengan kebutuhannya, namun suara masyarakat seringkali tidak didengar karena kedudukannya relatif rendah atau jumlah mereka terlalu sedikit dibanding anggota dari instansi pemerintah.
- f. Kerjasama, atas kesepakatan yang telah disetujui bersama, kekuasaan dalam berbagai hal dibagi antara pihak masyarakat dengan pihak pemegang kekuasaan. Dalam hal ini disepakati bersama untuk saling membagi tanggung jawab dalam perencanaan dan pembuatan keputusan serta pemecahan berbagai masalah ada kesamaan kepentingan antara pemerintah dan masyarakat.
- g. Pelimpahan kekuasaan, masyarakat diberi limpahan kewenangan untuk memberikan keputusan dominan pada rencana atau program tertentu. Untuk memecahkan perbedaan yang muncul, pemilik kekuasaan harus mengadakan tawar menawar dengan masyarakat dan tidak dapat memberikan tekanan-tekanan dari atas. Jadi masyarakat diberi wewenang untuk membuat keputusan rencana dan rencana tersebut kemudian ditetapkan oleh pemerintah.
- h. Kontrol masyarakat, masyarakat memiliki kekuatan untuk mengatur program atau kelembagaan yang berkaitan dengan kepentingan mereka.

Mereka mempunyai kewenangan dan dapat mengadakan negosiasi dengan pihak-pihak luar yang hendak melakukan perubahan. Dalam hal ini usaha bersama warga dapat langsung berhubungan dengan sumber-sumber dana untuk mendapat bantuan atau pinjaman tanpa melalui pihak ketiga, sehingga masyarakat memiliki kekuasaan.

3. Faktor pendorong berpartisipasi

Partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan akan terwujud sebagai suatu kegiatan nyata apabila terpenuhi faktor yang akan mendukungnya, yakni:³³

- a. Adanya kesempatan, merupakan adanya suasana atau kondisi lingkungan yang disadari oleh orang tersebut bahwa dia berpeluang untuk berpartisipasi.
- b. Adanya kemauan, yakni adanya sesuatu yang, mendorong atau menumbuhkan minat dan sikap mereka untuk termotivasi berpartisipasi, misalnya berupa manfaat yang dapat dirasakan atas partisipasinya tersebut.
- c. Adanya kemampuan, yaitu adanya kesadaran atau keyakinan pada dirinya bahwa dia mempunyai kemampuan untuk berpartisipasi, baik berupa pikiran, tenaga, waktu, atau sarana dan material lainnya.

Dari ketiga faktor tersebut dipengaruhi oleh faktor kehidupan manusia yang saling berinteraksi antara satu dengan yang lainnya. Seperti psikologi individu (*needs*, harapan, motif, *reward*), pendidikan, adanya informasi, keterampilan teknologi, kelembagaan yang mendukung, struktur dan stratifikasi sosial, budaya lokal, serta peraturan dan pelayanan pemerintah.

³³ Hendrawati Hamid, *Manajemen Pemberdayaan Masyarakat*, (Makasar: Della Macca, 2018), Cet. 1, hal. 165.

D. Pengelolaan Hutan

1. Konsep pengelolaan hutan

Pengelolaan merupakan suatu istilah yang berasal dari kata kelola mengandung arti serangkaian usaha yang bertujuan untuk menggali dan memanfaatkan segala potensi yang dimiliki secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan sebelumnya. Pengelolaan menurut Murniati adalah proses mengkoordinasikan dan mengintegrasikan semua sumber daya, baik sumberdaya manusia maupun sumberdaya alam untuk mencapai berbagai tujuan khusus yang ditetapkan dalam suatu organisasi.

Pengelolaan hutan merupakan penggunaan cara manajemen dan teknis kehutanan dalam menjalankan aktivitas terhadap suatu area hutan dengan cara melaksanakan berbagai kegiatan untuk tujuan konservasi, perlindungan dan pengembangan serta pengendalian penebangan hutan. pengelolaan hutan mempunyai tugas utama dalam membangun, mengatur dan mengendalikan bisnis kehutanan.³⁴ Pengelolaan hutan merupakan usaha untuk memanfaatkan hutan yang kegiatannya terdiri dari pemanenan, penebangan, penanaman, pengamanan, pengelolaan, pemanfaatan hasil hutan, dan perlindungan hutan.

Pengelolaan hutan adalah cara atau perbuatan untuk menyelenggarakan atau mengurus hutan. pengelolaan meliputi kegiatan:³⁵

- a. Tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan,
- b. Pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan,
- c. Rehabilitasi dan reklamasi hutan, dan
- d. Perlindungan hutan dan konservasi alam.

Pengelolaan kawasan hutan tidak hanya untuk kepentingan komersial, namun juga dapat dimanfaatkan untuk tujuan khusus. Tujuan

³⁴ Ahmad Mujaffar, *pemberdayaan Masyarakat dalam pengelolaan hutan*, (Lombok: Forum Pemuda Aswaja, 2020), Hal. 23.

³⁵ Salim hs, *pengantar hukum sumber daya alam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2018), hlm. 332.

khusus dikonsepsikan sebagai pengelolaan kawasan hutan yang bersifat khas atau istimewa.

Pengelolaan hutan yang baik tentu berperan besar dalam aspek peningkatan ekonomi masyarakat. Terdapat beberapa aspek dalam pengelolaan hutan yaitu akses terhadap hutan, yang merupakan kegiatan untuk melakukan interaksi terhadap hutan. ada juga pemanfaatan hutan yang dilakukan oleh masyarakat, hal ini LMDH menjadi faktor utama dalam pemanfaatan hutan, karena fungsi dari LMDH selain mengarahkan masyarakat juga sebagai penggerak untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan. partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan yang mana partisipasi juga menjadi kunci utama dalam pembangunan berkelanjutan monitoring dan evaluasi pengelolaan hutan. hal ini untuk mengukur kinerja pelaksanaan suatu program dalam mengawasi kegiatan yang sudah direncanakan.³⁶

2. Tujuan pengelolaan hutan

dalam proses pemberdayaan masyarakat dalam hutan kemasyarakatan dimaksudkan agar pengembangan kapasitas dan pemberian akses terhadap masyarakat setempat yang mengelola hutan dapat terjamin ketersediaan lapangan pekerjaan bagi masyarakat untuk memecahkan persoalan ekonomi dan sosial yang terjadi di tengah masyarakat.

Adapun tujuan pengelolaan hutan bersama masyarakat sebagaimana disebutkan yakni:³⁷

- a. Meningkatkan tanggungjawab perusahaan, masyarakat desa hutan, dan pihak yang berkepentingan terhadap keberlanjutan fungsi dan manfaat sumberdaya hutan.

³⁶ Dedy Setiawan, Gusti Hardiansyah, Dan Ganjar Oki Widhanarto, *Identifikasi Dampak Pengelolaan Hutan Desa Terhadap Peningkatan Ekonomi Masyarakat Bentang Pesisir Padang Tikar Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya*, Dalam *Jurnal Hutan Lestari*, Vol. 9, Hal. 7.

³⁷ M. Imam Arifandy dan Martua Sihaloho, *efektivitas pengelolaan hutan bersama masyarakat sebagai resolusi konflik sumberdaya hutan*, dalam *Jurnal sosiologi pedesaan*, 2015, Hal. 5.

- b. Meningkatkan peran perusahaan, masyarakat desa hutan dan pihak yang berkepentingan terhadap pengelolaan sumberdaya hutan.
- c. Memperluas akses masyarakat desa hutan dalam pengelolaan sumberdaya hutan.
- d. Menselaraskan kegiatan pengelolaan sumberdaya hutan sesuai dengan kegiatan pembangunan wilayah dengan kondisi dan dinamika sosial masyarakat desa hutan.
- e. Meningkatkan usaha-usaha produktif menuju masyarakat desa hutan mandiri yang mendukung terciptanya hutan lestari.

Menurut Karden Eddy Sontang Manik, dalam bukunya Ahmad Mujaffar yang berjudul pemberdayaan Masyarakat dalam pengelolaan hutan, tujuan dari pengelolaan hutan adalah:³⁸

- a. Meningkatkan kesejahteraan, kualitas hidup, kemampuan dan kapasitas ekonomi dan sosial masyarakat.
- b. Meningkatkan ikatan komunitas masyarakat pengelolaan hutan kemasyarakatan.
- c. Mengembangkan keanekaragaman hasil hutan yang menjamin kelestarian, fungsi dan manfaat hutan.
- d. Meningkatkan mutu, produktivitas, dan keamanan hutan.
- e. Menciptakan lapangan kerja, kesempatan berusaha, dan pendapatan negara.
- f. Mendorong dan mempercepat wilayah.

Dengan melihat jangka waktu pemanfaatan hutan, Santoso menyatakan bahwa hutan kemasyarakatan bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat melalui pemanfaatan sumberdaya hutan

³⁸ Ahmad Mujaffar, *pemberdayaan Masyarakat dalam pengelolaan hutan*, (Lombok: Forum Pemuda Aswaja, 2020), hlm.71

secara optimal, adil dan berkelanjutan dengan tetap menjaga kelestarian fungsi hutan dan lingkungan hidup.³⁹

E. Perhutanan Sosial

Sesuai dengan peraturan menteri lingkungan hidup dan kehutanan nomor P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 yang dimaksud dengan perhutanan sosial yaitu sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan di kawasan hutan negara hutan hak dan dilakukan oleh masyarakat lokal atau masyarakat dengan common law sebagai aktor kunci untuk meningkatkan kesejahteraan mereka, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya, ada berbagai bentuk sistem yang meliputi hutan desa, hutan rakyat, hutan tanaman, hutan rakyat, hutan adat, dan hutan asosiasi.

Pelaksanaan program perhutanan sosial didukung oleh kelembagaan yang kuat, baik di tingkat makro (pengelolaan kawasan) maupun di tingkat mikro (masyarakat desa hutan), sangat dipengaruhi oleh partisipasi anggota dan dinamika kelompok. Partisipasi anggota kelompok dalam melakukan kegiatan kelompok menentukan dinamika yang terjadi dalam kelompok.⁴⁰

Dalam konteks pemberdayaan masyarakat program perhutanan sosial dimulai dengan penguatan masyarakat didalam dan sekitar hutan, menyediakan akses masyarakat terhadap pengelolaan lahan di kawasan hutan yang telah dibebani hak atau didalam kawasan kesatuan pengelolaan hutan (KPH). Program ini juga merupakan alat untuk menyelesaikan konflik sumberdaya hutan yang muncul antara pengelola hutan dengan unit pengelolaan hutan dan masyarakat yang telah menggunakan kawasan hutan. pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat kehutanan berdasarkan permenhut No. P.39/2013. Masyarakat

³⁹ Ahmad Mujaffar, hlm.72.

⁴⁰ Ismatul Hakim, dkk, *Social Forestry Menuju Restorasi Pembangunan Kehutanan Berkelanjutan*, (Bogor: pusat penelitian dan pengembangan perubahan), hal. 35.

terlibat aktif memfasilitasi perumusan kebijakan, mensosialisasikan kepada para pihak dan menguji implementasinya,⁴¹

Perhutanan sosial merupakan sistem dan bentuk pengelolaan hutan yang melibatkan peran serta berbagai pihak yang dapat dilakukan dimana saja, dengan memberi perhatian bukan hanya peran dan hak masyarakat tetapi keterlibatan dan perhatian berbagai pihak atas pengelolaan sumberdaya hutan yang memadukan kegiatan perlindungan, kesejahteraan masyarakat lokal, dan tujuan produksi yang lestari. Program ini merupakan program dari perum perhutani untuk mengatasi konflik yang terjadi dalam pengelolaan hutan⁴²

Dalam teori fungsionalisme struktural Talcott parsons mengemukakan bahwa masyarakat merupakan sistem dari bagian-bagian yang saling berhubungan satu sama lain dengan demikian hubungan pengaruh mempengaruhi di antara bagian-bagian tersebut bersifat timbal balik. Parsons juga menilai bahwa sebenarnya masyarakat membentuk sebuah sistem yang terstruktur agar bisa menjaga keberlangsungan hidupnya harmonis dengan sistem lain dan bisa mengendalikan sesuatu yang menimbulkan kekacauan sehingga terjadi konflik.

Parsons juga mengembangkan konsep-konsep imperatif fungsional yang bertujuan agar sistem bisa bertahan. Imperatif tersebut biasa dikenal dengan AGIL yang merupakan singkatan dari *Adaptation, Goal Attainment, Integration,* dan *Latency*.

a. *Adaptation*, merupakan kemampuan masyarakat untuk berinteraksi dengan lingkungan yang ada dan alam sekitarnya. Hal ini mencakup segala hal seperti mengumpulkan sumber-sumber kehidupan dan komoditas dan redistribusi. Pada fungsi adaptation merupakan menyesuaikan diri dengan lingkungan dan mengubah lingkungan sesuai dengan kebutuhan.

⁴¹ Hasantoha Adnan, Hasbi Berliana, dkk, *Pemberdayaan masyarakat melalui kemitraan kehutanan*, (Jakarta: Kemitraan Partnership, 2018), hal. 2

⁴² M. Imam Arifandy dan Martua Sihaloho, *efektivitas pengelolaan hutan bersama masyarakat sebagai resolusi konflik sumberdaya hutan*, dalam *Jurnal sosiologi pedesaan*, Agustus 2015, Hal. 2.

Pada fungsi *Adaptation* mengenai perhutanan sosial, tindakan adaptasi masyarakat berupa menyesuaikan diri untuk mencari nafkah dengan melakukan kegiatan dalam program perhutanan sosial hal ini untuk mengatasi masalah ekonomi yang terjadi, tindakan adaptasi yang dilakukan oleh masyarakat adalah menjadi buruh petani pesanggem.

- b. *Goal attainment*, yakni kecakapan untuk mengatur dan menyusun tujuan masa depan dan membuat keputusan yang sesuai dengan tujuan tersebut. dalam hal ini berhubungan dengan pencapaian tujuan dan menggerakkan seluruh sumberdaya untuk mencapai tujuan.

Pada fungsi *Goal Attainment* ini agar program perhutanan sosial dapat mencapai tujuan yang telah direncanakan, antara negara dan juga masyarakat sekitar hutan. yang mana hutan milik negara diberi mandat oleh negara untuk mengelola kekayaan sumberdaya alam untuk kesejahteraan sosial agar masyarakatnya sejahtera dengan begitu program perhutanan sosial memiliki tujuan agar masyarakat dapat menikmati hasil hutan dengan cara pengelolaan, dalam hal ini masyarakat dapat menikmati hasil hutan melalui pengelolaan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Maka dari itu Negara dan masyarakat memiliki tujuan yang sama yaitu untuk kesejahteraan.

- c. *Integration*, adalah harmonisasi keseluruhan anggota sistem sosial setelah sebuah general agreement mengenai nilai-nilai atau norma-norma pada masyarakat telah ditetapkan dengan mengontrol komponen pembentuk masyarakat.

Pada fungsi Integrasi ini mengatur antar hubungan untuk menciptakan keharmonisan, akan tetapi dalam metode hutan Negara, mengenai penanaman tanaman Industri masyarakat tidak bisa mengambil manfaat dari tanaman industri tersebut maka Agar terjadi integrasi caranya diubah menjadi sosial forestry karena antara negara dan masyarakat memiliki tujuan yang sama,

dalam hal ini masyarakat dapat memperoleh manfaat dari tanaman industri tersebut,

- d. *Latency*, merupakan pemeliharaan pola, yang berisi nilai-nilai kemasyarakatan tertentu seperti budaya, bahasa, norma, aturan, dan sebagainya.⁴³

Dalam fungsi *Latency* atau pemeliharaan, ketika adaptasinya sudah berjalan dan *social Forestry* nya juga sudah berjalan maka perlu dirawat melalui pembentukan kelembagaan yang merupakan kumpulan norma dan nilai yang mengatur hubungan antar masyarakat.

F. Konsep Partisipasi Masyarakat Terhadap Perhutanan Sosial

Konsep partisipasi yang artinya melibatkan masyarakat sebagai bentuk dari bagian kawasan hutan sekitarnya. Tentunya konsep partisipasi memerlukan peran penyuluh untuk bisa terampil dan berpengetahuan dalam mengelola hutan. keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan program dan keputusan yang telah ditetapkan melalui sumbangan sumberdaya atau bekerja sama dalam suatu organisasi. keterlibatan masyarakat menikmati manfaat dari pembangunan serta dalam evaluasi pelaksanaan program.⁴⁴

adapun partisipasi masyarakat dalam perhutanan sosial mengacu pada empat tahapan Cohen dan Uphoff yaitu:⁴⁵

1. Tahap pengambilan keputusan atau tahap perencanaan

Tahap perencanaan yang diwujudkan dengan keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan rapat atau musyawarah. Tahap pengambilan keputusan yang dimaksud yaitu pada perencanaan dan pelaksanaan suatu program.

⁴³ Akhmad Rizki Turama, *Formulasi teori fungsionalisme struktural talcott parsons*, Universitas Sriwijaya, Hal. 9.

⁴⁴ Witno, Maria, dan Dicky Supandi, “Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (Hkm) Tandung Billa Di Kelurahan Battang Kota Palopo”, dimuat dalam *Jurnal penelitian kehutanan Bonita*, vol. 2, no. 2, Desember 2020, hlm. 38.

⁴⁵ Siti Robiah Nurbaiti dan Azis Nur Bambang, “Faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat dalam pelaksanaan program corporate social responsibility (CSR)”, dimuat dalam *Proceeding Biology Education Conference*, vol. 14, oktober 2017, hlm. 223.

2. Tahap pelaksanaan

Tahap pelaksanaan merupakan tahap terpenting dalam pembangunan, sebab inti dari pembangunan adalah pelaksanaannya. Wujud nyata partisipasi pada tahap ini digolongkan menjadi tiga, yaitu partisipasi dalam bentuk pemikiran, bentuk materi, dan bentuk tindakan.

3. Tahap menikmati hasil

Tahap menikmati hasil dapat dijadikan indikator keberhasilan partisipasi masyarakat pada tahap perencanaan dan pelaksanaan. Apabila semakin besar nilai manfaat yang dirasakan maka program tersebut berhasil mengenai masyarakat.

4. Tahap evaluasi

Partisipasi pada tahap ini merupakan umpan balik yang dapat memberi masukan demi perbaikan pelaksanaan proyek selanjutnya.

Konsep pembangunan berkelanjutan secara partisipatif yang melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan memiliki tujuan antara lain meningkatkan kesejahteraan penduduk pedesaan termasuk yang berdomisili di dalam dan di sekitar kawasan hutan, mengikutsertakan dalam pengambilan keputusan dan mampu mengubah kehidupan mereka. Keberpihakan dan kepedulian pemerintah pada penduduk miskin pedesaan ini sangat wajar dikarenakan kondisi kehidupan sosial ekonomi masyarakat pinggiran hutan yang sangat rentan dengan perubahan sosial, ekonomi dan politik.⁴⁶

⁴⁶ Dona Octavia, Irma Yeny dan Kirsfianti L. Ginoga, "Pengelolaan Hutan Secara Partisipatif Menuju KPH Hijau untuk mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan", (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2012), hlm.2.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

penelitian tentang pemberdayaan masyarakat dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan pinus di kedungurang ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna. Makna merupakan data yang sebenarnya, data yang pasti yang merupakan suatu nilai dibalik data yang tampak.⁴⁷ Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena penulis bermaksud mendeskripsikan bagaimana “pemberdayaan masyarakat dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan pinus di Kedungurang”. Dengan menggunakan pendekatan ini diharapkan peneliti dapat menghasilkan data yang bersifat deskriptif, menjelaskan fenomena yang kadangkala merupakan yang sulit untuk dipahami secara memuaskan.⁴⁸

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke lokasi penelitian. Dengan hal ini peneliti menggunakan penelitian kualitatif karena ingin mengetahui pemberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan pinus di Kedungurang.

Dalam hal ini, data yang disajikan oleh peneliti merupakan hasil dari observasi, wawancara, dan dokumentasi peneliti dengan masyarakat sekitar hutan dan pihak yang berkaitan. Hal ini membuat penulis mampu mengerti mengenai pengelolaan hutan untuk pemberdayaan masyarakat desa Kedungurang, Kecamatan Gumelar, Kabupaten Banyumas.

⁴⁷ Sugiyono, “Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D”, (Bandung: ALFABETA, cet. Ke-19, 2013), hlm. 9.

⁴⁸ Pupu Saeful Rahmat, “*Penelitian Kualitatif*”, dimuat dalam *Jurnal EQUILIBRUM*, vol. 5, no. 9, Januari-Juni 2019, hlm. 2.

B. Tempat dan waktu penelitian

1. Tempat Penelitian

Dalam pelaksanaan penelitian ini. Penelitian berlokasi tepatnya di dusun Cirangkong desa Kedungurang Kecamatan Gumelar Kabupaten Banyumas.

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian yaitu dilaksanakan pada tanggal 13 Juli 2021 sampai 30 Desember 2022

C. Sumber Data

Dalam pengumpulan sumber data, peneliti melakukan pengumpulan sumber data dalam wujud data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang berasal dari sumber asli atau pertama. Data ini tidak tersedia dalam bentuk tekompilasi ataupun dalam bentuk file-file. Data ini harus dicari melalui narasumber atau dalam istilah teknisnya responden atau orang yang kita jadikan objek penelitian atau orang yang kita jadikan sebagai sarana mendapatkan informasi ataupun data.⁴⁹ adapun informan dalam penelitian ini adalah, masyarakat pengelola lahan, ketua pengelola lahan, dan pihak perum perhutani.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara. Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari artikel, jurnal ilmiah, buku, dll.

c. Objek dan subjek penelitian

1) Objek penelitian

Objek penelitian kualitatif merupakan seluruh bidang atau aspek kehidupan manusia, Objek atau masalah dalam penelitian ini adalah

⁴⁹ Nuning Indah Pratiwi, "penggunaan media video call dalam teknologi komunikasi", dimuat dalam *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, vol. 1, no.2, Agustus 2017, hlm. 211.

pemberdayaan masyarakat dan juga partisipasi masyarakat dalam praktik pengelolaan lahan hutan pinus.

2) Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian adalah:

1. ketua LMDH (Lembaga Masyarakat Desa Hutan)
2. pihak perum perhutani
3. masyarakat pengelola lahan hutan pinus

D. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data menurut Sugiyono (2006:62) adalah langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah.⁵⁰

a) Observasi

Observasi atau pengamatan langsung adalah kegiatan pengumpulan data dengan melakukan penelitian langsung terhadap kondisi lingkungan objek penelitian yang mendukung kegiatan penelitian, sehingga didapat gambaran secara jelas tentang kondisi objek penelitian tersebut (Siregar, 2014: 42). Metode observasi ini digunakan untuk mengetahui situasi dan kondisi yang terjadi ditempat penelitian.⁵¹ Teknik observasi ini dilakukan dengan pengamatan secara langsung untuk mengetahui tentang pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan hutan, dan partisipasi masyarakat dalam praktik pengelolaan hutan. peneliti turun langsung ke lapangan untuk melihat fakta yang terjadi di lapangan.

⁵⁰ Suci Arischa, “Analisis Beban Kerja Bidang Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru”, dimuat dalam *Jurnal JOM Fisip*, vol. 6, edisi 1 Januari-Juni 2019, hlm. 7.

⁵¹ Faradila Safitri, dan Elva Nuraina, “pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor pelayanan Pajak pratama Madiun”, dimuat dalam *Jurnal EQUILIBRIUM*, VOL. 5, NO. 1, Januari 2017, hlm. 50.

b) Wawancara

Wawancara merupakan percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Wawancara dilakukan dengan dua cara yaitu wawancara bebas dan terprogram. Wawancara bebas dilakukan terhadap beberapa informan dan narasumber untuk memperoleh data yang sifatnya umum. Wawancara terprogram dilakukan untuk menggali data yang benar-benar diperlukan dalam penelitian.⁵² wawancara dalam penelitian ini ditujukan kepada pengelola lahan hutan dan pihak yang terlibat secara langsung untuk memperoleh informasi terkait dengan apa yang diteliti.

c) Dokumentasi

Dokumentasi ini digunakan untuk membantu menampilkan kembali beberapa data yang mungkin belum dapat diperoleh. Beberapa catatan tertulis dan gambar diperlukan untuk membantu dalam menganalisis data penelitian. Sebagian besar data audio visual berupa gambar. Data yang berupa dokumentasi berguna dalam mengecek kebenaran kembali agar lebih memudahkan deskripsi.⁵³ Metode dokumentasi penulis gunakan untuk mencari konsep, teori, data yang berkaitan dengan penelitian, yang diperoleh dari buku, dokumen, peraturan dan lain-lain.

E. Teknik Analisis Data

teknik analisis data disebut juga pengolahan data atau penafsiran data merupakan rangkaian kegiatan penelaahan, pengelompokan, sistematisasi,

⁵² Subandi, "Deskripsi kualitatif sebagai satu metode dalam penelitian pertunjukan", dimuat dalam *Jurnal Harmonia*, Vol. 11, No.1, Desember 2011, hlm. 177.

⁵³ Subandi, " *Deskripsi Kualitatif Sebagai Satu Metode Dalam Penelitian Pertunjukan*", dimuat dalam *Jurnal Harmonia*, vol. 11, no. 2 Desember 2011, hlm. 177.

penafsiran dan verifikasi data agar sebuah fenomena memiliki nilai sosial, akademis, dan ilmiah.⁵⁴ Proses analisis data dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Reduksi Data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhaan, pengabstrasikan dan pentransformasian data kasar dari lapangan. Proses ini berlangsung selama penelitian, dari awal hingga akhir penelitian. Produk dari reduksi data adalah berupa ringkasan dari catatan.⁵⁵Data yang diperoleh dari lapangan mengenai pemberdayaan masyarakat dalam praktik pengelolaan hutan yang nantinya akan dirangkum dengan memilih poin-poin yang penting.

b. Penyajian Data

Menurut Miles dan Huberman bahwa: penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Langkah ini dilakukan dengan menyajikan sekumpulan informasi yang tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan.⁵⁶ Dari informasi yang telah terusun dalam bentuk yang padu dan mudah dicerna sehingga peneliti dapat menarik kesimpulan dari data yang telah diperoleh.

c. Kesimpulan atau Verifikasi

Penarikan kesimpulan merupakan bagian dari suatu kegiatan konfigurasi yang utuh (Miles & Huberman, 2007: 18) dari pengumpulan data, seorang menganalisis kualitatif mulai mencari arti benda-benda, mencatat

⁵⁴ Heri Herdiawanto dan Jumanta Hamdayama, *Dasar-Dasar Penelitian Sosial*, (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 66.

⁵⁵ Sandi Hesti Sondak, Rita N. Taroreh, Yantje Uhing, "Faktor-faktor loyalitas pegawai di dinas pendidikan daerah provinsi sulawesi utara", dimuat dalam *Jurnal EMBA*, vol. 7, no.1, Januari 2019, hlm. 675.

⁵⁶ Sandu Siyoto, dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, cet.1, 2015), hlm. 123.

keteraturan, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan proposisi.⁵⁷



⁵⁷ Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: C.V. Jejak, cet. 1, 2018), hlm. 249.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Letak Geografis Desa Kedungurang

Desa Kedungurang Termasuk Pegunungan Merupakan Desa Yang Mayoritas Penduduknya Masih Memilih Alam Menjadi Salah Satu Mata Pencahariannya. Salah Satu Pemilihan Alam Yang Menjadi Mata Pencaharian Masyarakat Kedungurang Mayoritas sebagai petani. Desa Kedungurang Merupakan Salah Satu Desa Yang Berada Di Kecamatan Gumelar Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Dengan Jarak Dari Pusat Pemerintah Kecamatan Kurang Lebih 7 Km. Jarak Dari Ibukota Kurang Lebih 28 Km Desa Kedungurang Memiliki 8 Rw Dan Memiliki Beberapa Grumbul Yaitu Kedungurang, Petir, Ciwera, Cimenga, Dan Cirangkong.

Desa Kedungurang merupakan daerah pegunungan dengan batas wilayah

Sebelah utara : Desa Cihonje
Sebelah selatan : Desa Cibangkong
Sebelah Barat : Desa Petahunan
Sebelah Timur : Desa Gancang

2. Gambaran Demografi Desa Kedungurang

Jumlah penduduk desa Kedungurang sebanyak 6.265 jiwa yang tersebar di 8 RW dan 43 RT.

a. Jumlah Penduduk menurut jenis kelamin

Tabel 4.1

JUMLAH PENDUDUK DESA KEDUNGURANG

NO	JUMLAH
1	Jumlah Laki-Laki 3.185 Orang
2	Jumlah Perempuan 3.080 Orang

3	Jumlah Total	6.265 Orang
4	Jumlah Kepala Keluarga	2.170 KK

Sumber: Data Dokumentasi Desa Kedungurang

Jumlah populasi Desa Kedungurang terdiri dari 2.170 KK dan dengan jumlah penduduk nya 6.265 jiwa yang terdiri dari laki-laki 3.185 jiwa, perempuan 3.080 jiwa.

b. Berdasarkan Usia

TABEL 4.2

KOMPOSISI PENDUDUK MENURUT USIA

NO	Usia	Jumlah
1	0-17	1.584 Jiwa
2	18-56	3.534 Jiwa
3	56-ke atas	1.147 Jiwa

Sumber: Data Dokumentasi Desa Kedungurang

Pada tabel komposisi penduduk menurut usia jumlah penduduk terbanyak pada usia 18-56 yang berjumlah 3.534 jiwa sedangkan yang paling sedikit pada usia 56 ke-atas.

c. Berdasarkan tingkat Pendidikan

pendidikan merupakan hal yang penting dalam menumbuhkan sumber daya manusia (SDM) yang bisa berpengaruh dalam jangka panjang untuk masa depan. Penduduk desa Kedungurang menurut tingkat pendidikan.

TABEL 4.3

PENDUDUK BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN

No	Tingkat pendidikan	Jumlah
1	Lulusan SD	2.503 Orang

2	Lulusan SMP	825 Orang
3	Lulusan SMA	273 Orange
4	Akademi/D1-D3	37 Orang
5	Sarjana S1	57 Orang
6	Sarjana S2	1 Orang

Sumber: Data Dokumentasi Desa Kedungurang

Pada tabel diatas pendidikan terbanyak Lulusan SD dengan jumlah 2.503 orang. sedangkan tingkat pendidikan sedikit sarjana S2 hanya 1 orang.

d. Berdasarkan mata pencaharian

Mata pencaharian merupakan pekerjaan yang dilakukan setiap hari. Penduduk Desa Kedungurang berdasarkan mata pencaharian dapat diklasifikasikan seperti pada tabel.

TABEL 4.4
PENDUDUK BERDASARKAN MATA PENCAHARIAN

No	Mata Pencaharian	Jumlah
1	Pegawai Negeri Sipil	29 Orang
2	TNI/Polri	1 Orang
3	Wiraswasta/Pedagang	423 Orang
4	Buruh Tani	1.122 Orang
5	Petani	121 Orang
6	Pensiunan	180 Orang
7	Swasta	295 Orang

Sumber: Data Dokumentasi Desa Kedungurang

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat mata pencaharian penduduk Desa Kedungurang mayoritas sebagai buruh tani dengan jumlah 1.122 Orang.

B. Pengelolaan hutan oleh Lembaga Masyarakat Desa Hutan

1. Terbentuknya LMDH Wana Makmur

Lembaga masyarakat desa hutan merupakan salah satu bentuk organisasi masyarakat yang dibentuk oleh masyarakat desa yang berada di sekitar hutan untuk mengatur dan memenuhi kebutuhannya melalui interaksi terhadap hutan. lembaga masyarakat desa hutan yang ada di desa Kedungurang dibentuk pada tanggal 29 mei 2003. Awal mula adanya perhutanan Sosial di Desa Kedungurang semenjak Presiden Indonesia ke-2 Bapak Soeharto turun tahta banyak hutan yang akan di jarah oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Maka dari itu pemerintah melakukan regenerasi hutan dengan melakukan pengelolaan hutan bersama masyarakat (PHBM) dengan membentuk lembaga masyarakat desa hutan agar tetap lestari dengan melibatkan peran serta masyarakat sekitar hutan sekaligus untuk menjaga hutan.

Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) merupakan lembaga yang bergerak dan bersifat sosial dengan maksud mendapatkan hasil yang optimal dari pemanfaatan tanah-tanah hak Perhutani untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat umumnya dan petani.

Teknik pelaksanaannya dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat baik itu mengenai program perhutani maupun terkait dengan keamanan hutan, pelatihan mengenai teknik penyadapan sampai dengan pengumpulan getah dan menjualnya ke perhutani. Pengelolaan hutan ini pun sebagai sarana edukasi bagi masyarakat sekitar hutan untuk melakukan pelestarian terhadap hutan agar hutan tetap lestari dan mengurangi penjarahan. Kegiatan pengelolaan hutan menjadi salah satu bentuk dari kesejahteraan

bagi masyarakat karena dapat meningkatkan pendapatan dan juga mengurangi pengangguran.⁵⁸

2. Tujuan LMDH Wana Makmur

- a. Membina dan mengembangkan usaha anggota di bidang produksi, pengolahan dan pemasaran hasil usaha,
- b. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan anggota,
- c. Ikut serta membangun dan melestarikan hutan melalui kerjasama dengan perum perhutani,
- d. Memberikan pelayanan atau menyalurkan kepada anggota yang menyangkut kebutuhan usaha produktif, misalnya dalam hal usaha tani: pupuk insektisida dan alat-alat pertanian,
- e. Meningkatkan kesejahteraan anggota, merupakan tujuan akhir dibentuknya lembaga ini,

3. Syarat menjadi anggota

- a. Penduduk desa Kedungurang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk desa kedungurang, kecamatan Gumelar atau penduduk sekitar Desa Kedungurang yang mempunyai andil garapan maupun pekerjaan pemanfaatan tanah-tanah hak perum perhutani di wilayah pangkuan Desa kedungurang dibuktikan dengan surat keterangan kepala desa yang bersangkutan dan disetujui oleh kepala desa kedungurang kecamatan gumelar.
- b. Berdomisili di Desa Kedungurang atau sekitar desa kedungurang sekurang-kurangnya selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dan dibuktikan dengan surat keterangan kepala desa kedungurang atau kepala desa yang bersangkutan.
- c. Petani penggarap yang memperoleh manfaat tanah-tanah hak perum perhutani mulai dari pengadaan tanaman, pemeliharaan, sadapan, dan

⁵⁸ Wawancara dengan Bapak Kadir, Mandor perhutani pada 7 Januari 2023 pukul 11.00

tebangan di wilayah pangkuan desa kedungurang, kecamatan gumelar secara langsung.

d. Namanya terdaftar dalam buku daftar anggota lembaga.

4. Susunan Kepengurusan LMDH Wana Makmur

Susunan kepengurusan LMDH “Wana Makmur” Desa Kedungurang

No	Jabatan	Nama
1.	PELINDUNG	Wahyudin
2.	PENASEHAT	Sarwono
3.	PEMBINA	Sutrisno
4.	KETUA I	Sukaryo
5.	KETUA II	Sisworo
6.	SEKRETARIS	Waskun
7.	BENDAHARA I	Abdul Haris
8.	BENDAHARA II	Gatot Sucipto
	SEKSI-SEKSI	
9.	PERENCANAAN	Abu Sunanto
10.	SARANA-SARANA	1. Suyitno
		2. Riswadi
11.	BUDIDAYA HUTAN	1. Dakun
		2. Sutir
12.	KEAMANAN HUTAN	1. Suparno
		2. Ritam
13.	MEMBAGI HASIL	1. Gatot Sucipto
		2. Kusen

Sumber: data Kepengurusan LMDH Wana Makmur tahun 2002

Tugas – tugas pengurus

1) Tugas ketua 1

- a. Memimpin pertemuan atau rapat
 - b. Membagi tugas
 - c. Mewakili kelompok
 - d. Membimbing anggota
 - e. Memelihara kerjasama
 - f. Mempertanggung jawabkan laporan kegiatan pada pertemuan dan akhir masa jabatan
 - g. Bertanggung jawab mengurus urusan-urusan yang berkaitan dengan eksternal dan internal lembaga.
- 2) Tugas ketua II
- a. Membantu melaksanakan tugas-tugas ketua
 - b. Bertanggung jawab mengurus urusan-urusan yang berkaitan dengan internal lembaga
 - c. Melaksanakan tugas ketua I jika yang bersangkutan berhalangan hadir dalam satu rapat/pertemuan.
- 3) Tugas Sekretaris I
- a. Membuat catatan daftar anggota
 - b. Mengadakan buku anggota dan atau kartu anggota
 - c. Inventarisasi harta lembaga
 - d. Bertanggung jawab terhadap sekretariat lembaga
 - e. Mengerjakan surat menyurat
 - f. Menyusun laporan kegiatan
 - g. Melakukan tugas yang diberikan oleh ketua.
- 4) Tugas bendahara I
- a. Bersama ketua dan sekretaris membuat rencana kegiatan atau menyusun anggaran pendapatan dan belanja lembaga
 - b. Mencatat dan menerima simpanan anggota
 - c. Mencatat kebutuhan sarana dan prasarana produksi lembaga
 - d. Menyusun laporan keuangan lembaga

- e. Bendahara bertanggung jawab pada seluruh pemasukan dan pengeluaran keuangan lembaga
 - f. Melakukan tugas yang diberikan ketua.
- 5) Tugas bendahara II
- a. Membantu tugas-tugas bendahara I
- 6) Tugas seksi-seksi
- a. Seksi perencanaan, bertanggung jawab dalam perencanaan kegiatan lembaga dimulai dari observasi potensi tanah yang tersedia, perencanaan bibit tanaman, perencanaan perkiraan perolehan hasil.
 - b. Seksi sarana prasarana, bertanggung jawab terhadap penyediaan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam kegiatan lembaga baik yang bersifat teknis maupun non teknis.
 - c. Seksi budidaya, bertanggung jawab terhadap pengembangan jenis-jenis tanaman yang akan ditanam, pemilihan bibit yang berkualitas, penelitian mengenai metode penanaman yang baik dan metode pemeliharaan dari gangguan penyakit maupun lingkungan ekologi dan peningkatan kualitas tanaman, pengadaan kursus-kursus, pelatihan maupun pendidikan kepada anggota.
 - d. Seksi keamanan hutan, sesuai kewenangan bertanggung jawab terhadap kelestarian hutan dan keamanan hutan maupun tanaman yang diusahakan oleh lembaga dari segala macam bentuk gangguan lain berupa penjarahan, pencurian pohon dan tanaman palawija, penebangan liar maupun gangguan lain yang dapat mengancam kelestarian dan keamanan hutan.
 - e. Seksi membagi hasil, bertanggung jawab terhadap perhitungan benefit-cost (pengeluaran/pemasukan) dari hasil yang diperoleh, pendataan tanaman berkaitan dengan nilai ekonomi, pengawasan terhadap kinerja dan atau aktivitas anggota dalam kegiatan lembaga,

membagi hasil sesuai dengan kinerja dan atau aktivitas yang telah dilakukan oleh anggota.⁵⁹

5. Proses pelaksanaan pengelolaan Hutan

Proses pelaksanaan pengelolaan hutan ini dimulai dari adanya proses sosialisasi pengelolaan hutan yang dilakukan secara bertahap kepada masyarakat Kedungurang.

a. Sosialisasi

Sosialisasi dilakukan terkait dengan penyusunan rencana pengelolaan hutan sebagai upaya pendekatan kepada masyarakat sekitar hutan untuk memperkenalkan mengenai perhutanan sosial yang mana program perhutanan sosial melibatkan masyarakat sekitar hutan diperbolehkan untuk turut serta dalam pengelolaan hutan, hal ini dilakukan oleh perum perhutani sebagai antisipasi terjadinya penjarahan hutan.

Sosialisasi pengelolaan hutan dilakukan bersama masyarakat dengan membentuk Lembaga masyarakat desa hutan. terkait dengan perawatan hutan, pelatihan penyadapan, dan keamanan hutan. Adapun bentuk partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan dimulai ketika pohon pinus itu sudah layak untuk di tebang, hutan menjadi gundul disitulah masyarakat sekitar hutan memulai menggarap hutan yang gundul tersebut, dengan ditanami tanaman pertanian seperti singkong, jagung, umbi-umbian, kacang, dan lain-lain. Setelah itu masyarakat bersama perhutani melakukan penyemaian bibit pinus, menyiapkan lubang yang akan ditanami pohon pinus. Dan setelah tanaman pinus dilakukan penanaman maka petani tidak boleh menggarap lahan hutan tersebut selama 2 tahun, sampai dengan tanaman pinus besar. Dan apabila pohon pinusnya sudah tinggi dan sudah layak di sadap masyarakat juga

⁵⁹ Dokumentasi anggaran dasar rumah tangga LMDH Wana makmur

melakukan penyadapan getah pinus tersebut. Sosialisasi pengelolaan hutan dilaksanakan disalah satu rumah warga yaitu Ibu Dairah Cimenga selaku ketua rukun warga (RW).

b. Pemanfaatan hutan

Dalam melakukan pemanfaatan hutan dilakukan oleh masyarakat guna untuk kesejahteraan sosial, masyarakat memanfaatkan pohon pinus tersebut dengan cara menyadap pinus. Masyarakat disini sebagai petani penyadap atau pesanggem atau sebagai buruh tani. Dalam hal ini masyarakat memiliki perubahan pendapatan dan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat setempat.

c. Rehabilitasi hutan

Hal ini dilakukan guna untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi hutan, seperti halnya pemeliharaan tanaman industri. Dengan adanya kegiatan rehabilitasi dan reklamasi hutan. hutan menjadi lebih lestari dan dapat berfungsi kembali secara secara lebih baik.

d. Perlindungan Hutan.

Terkait dengan perlindungan hutan, masyarakat juga bertanggungjawab mengenai keamanan hutan agar terhindar dari hal hal yang merugikan hutan maupun petani. Misalnya kebakaran hutan dengan cara ketika musim kemarau petani penyadap tidak boleh membuang putung rokok secara sembarangan dan juga dalam hal melakukan kebersihan hutan atau merawat hutan ilalang yang sudah kering tidak boleh melakukan pembakaran secara sembarangan pula.

6. Kendala dalam pengelolaan hutan

Dalam melakukan pengelolaan hutan terdapat kendala dari setiap proses yang berlangsung terkait dengan manajemen waktu.karena latar belakang pesanggem merupakan petani sawah. ketika petani pesanggem pada masa waktu nyawah atau melakukan pekerjaan di sawah sehingga tidak ada waktu untuk menyadap dan petani tersebut lebih mementingkan garapan

sawahnya ketimbang melakukan penyadapan getah. Akan tetapi dari pihak perhutani memberikan himbauan kepada petani agar bisa mengatur waktunya dan tetap melakukan penyadapan.

C. Pengelolaan Hutan untuk Pemberdayaan Masyarakat dan kesejahteraan sosial

1. Bentuk pengelolaan hutan untuk pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial

Jika melihat kondisi yang terjadi, berupa persoalan kemiskinan adanya ketimpangan dan konflik penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, ketidakadilan sosial ekonomi rakyat serta kerusakan sumberdaya alam, maka strategi hutan sosial menjadi tujuan masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan, berkelanjutan, ramah lingkungan serta membangun kemandirian ekonomi.

Program hutan sosial meliputi pemanfaatan untuk kesejahteraan, partisipasi masyarakat, kemudian produktifitas rakyat, menjaga lingkungan dan fungsi alam, serta jiwa konservasi dan perlindungan hutan. salah satu tujuan perhutanan sosial untuk mengentaskan kemiskinan dan sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar hutan.

Hutan milik negara di desa Kedungurang memiliki luas 820 hektar yang dalam pengelolaannya melibatkan peran serta dari masyarakat sekitar. Dalam kegiatannya meliputi, pembibitan, penanaman pohon, dan mengelola atau memanfaatkan hasil hutan. pembentukan lembaga masyarakat desa hutan menjadi wadah masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan pengelolaan hutan.

Bentuk pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh perum Perhutani yaitu pemberdayaan melalui program yang berunsur pemberdayaan masyarakat berbasis pelestarian hutan. program program yang dijalankan tentunya mempunyai tujuan untuk menumbuhkan kesejahteraan masyarakat serta meningkatkan kelestarian kawasan hutan.

Hutan yang ada di Desa Kedungurang didominasi oleh tegakan pinus. Dimana hasil getah pinus mempunyai nilai yang cukup tinggi. perhutani dalam pelaksanaan melibatkan masyarakat secara langsung. Hal ini bertujuan untuk memberikan peran dan tanggung jawab langsung kepada masyarakat mengenai pengelolaan hutan guna menjaga kelestarian hutan.

Secara umum bentuk pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan hutan yang ada di desa kedungurang terdapat dua jenis program perhutanan sosial yakni berupa penanaman tumpangsari dan penyadapan getah pinus, adapun penjabarannya yaitu sebagai berikut:

a. Tanaman Tumpangsari

Dalam pemanfaatan pengelolaan kawasan hutan di desa Kedungurang menggunakan sistem tanaman tumpangsari yang disitu masyarakat memanfaatkan tanah dibawah tegakan pinus dengan menanam tanaman-tanaman pertanian. Masyarakat desa Kedungurang biasanya menanam Kapulaga, yaitu tanaman sejenis rempah-rempah yang biasanya digunakan untuk penambah rasa dan juga aroma pada masakan, dan juga untuk campuran jamu tradisional. Masyarakat desa Kedungurang memilih tanaman Kapulaga karena harga jual kapulaga saat ini cukup tinggi sehingga masyarakat dengan adanya sistem pertanian tumpangsari berinisiatif untuk kompak menanam tanaman kapulaga.

pemerintahan perhutani menyerahkan sepenuhnya kepada masyarakat kawasan mengenai tanaman apa yang akan dijadikan tanaman tumpangsari, yang pada akhirnya kita memilih tanaman Kapulaga. Untuk tambahan penghasilan, sistem tumpangsari sangat bermanfaat, sebagai tambahan penghasilan.⁶⁰

Dalam penanaman tumpangsari masyarakatlah yang menanam tanaman tersebut dibawah tegakan pohon dominasi, dengan sepenuhnya

⁶⁰ Wawancara dengan bapak Sukaryo, selaku Ketua LMDH pada 10 Desember 2022 pukul

ditanggung oleh masyarakat tersebut, mulai dari penanaman hingga pemupukan, karena nantinya hasil dari tanaman tumpangsari sepenuhnya untuk masyarakat yang menanam asalkan tidak merusak tanaman pokok. Bahkan dalam penanaman pinus pun pupuk yang digunakan mengikuti tanaman tumpangsari, pada saat penyemaian pinus dalam masa pembibitan dan masih kecil, terdapat tanaman tumpangsari berupa tanaman pertanian berupa jagung, ketela, kacang, dll. ketika itu tanaman tumpangsari dalam penyebaran pupuk secara otomatis bibit pinus juga keturahan pupuk yang dilakukan oleh masyarakat.

Maka dari itu identifikasi pengelolaan kawasan hutan dengan sistem tumpangsari yang dilakukan perhutani sangat bermanfaat bagi masyarakat, masyarakat dapat menanam tanaman yang bernilai ekonomis, sehingga masyarakat bisa mendapatkan penghasilan tambahan.

b. Penjadapan Getah Pinus

Hutan produksi Desa Kedungurang sangat didominasi oleh pohon pinus yang getahnya memiliki nilai jual yang ekonomis. Kualitas getah pinus yang dihasilkan dari pohon pinus bermacam-macam kualitasnya. Mulai dari kualitas 2B,2A,1B,1A, premium dan super premium. Sehingga dengan adanya program perhutanan sosial masyarakat memanfaatkan pohon pinus untuk mengambil getah dengan cara menyadap kulit pohon pinus. Getah yang sudah dikumpulkan oleh masyarakat nantinya dijual ke perhutani dengan harga sesuai dengan kualitas getah yang dihasilkan.

Proses penyadapan dilakukan setiap hari dikumpulkan kedalam ember untuk dijual ke Perhutani. Perhutani memberikan waktu kepada pesanggem untuk penjualan getah dilakukan dalam seminggu dua kali. Akan tetapi masyarakat desa Kedungurang dalam melakukan penjualan getah pinus ke perhutani dilakukan Dalam 2 minggu sekali dengan hasil getah mencapai 250 kilogram.

Dalam proses penjualan getah pinus masyarakat menjualnya ke perhutani yang dilakukan oleh pesanggem setiap hari Rabu dan hari Sabtu. Waktu dalam penjualan getah pagi hari dari jam 7 sampai pukul 9 pagi, karena keinginan pesanggem agar dilaksanakan dipagi hari. Agar pesanggem dapat melakukan pekerjaan yang lain. Perhutani menerima tarif sadapan pinus sebagai berikut:⁶¹

No	Mutu	KK/KA	Biaya/kg
1	Super Premium	< 5%	5.680
2	Premium	5% < KK/KA ≤ 10%	5.380
3	IA	10% < KK/KA ≤ 12%	4.900
4	IB	12% < KK/KA ≤ 14%	4.500
5	IIA	14% < KK/KA ≤ 16%	4.000
6	IIB	16% < KK/KA ≤ 18%	3.750

Hasil kualitas getah pinus di desa kedungurang sampai saat ini masih dalam golongan kualitas 2A. hal ini dikarenakan oleh faktor penyadap getah itu sendiri dan juga faktor cuaca. Dengan berbagai macam kualitas getah harga dari getah tersebut juga tergantung kualitas dari getah yang disadap.⁶²

Cuaca yang mempengaruhi kualitas getah pinus merupakan cuaca hujan. Karena musim hujan serapan getah pinus akan berkurang, selain itu hujan juga menyebabkan kadar air yang terdapat didalam getah akan semakin tinggi. Hal itu juga yang menyebabkan kualitas getah jadi menurun. Selain faktor cuaca juga faktor sumber daya manusia (SDM). Untuk menghasilkan getah pinus yang premium memang tergantung dengan pola penyadapan getah yang dilakukan oleh masyarakat. Masyarakat menyadap getah pinus dengan

⁶¹ Observasi pada tanggal 19 November 2022.

⁶² Wawancara Bapak Sukaryo, selaku ketua LMDH pada 10 Desember 2022 pukul 14.00

teknik penyadapan yang tidak teratur dengan teknik yang mereka anggap mudah.⁶³

Masyarakat harus mengubah pola penyadapan agar mendapatkan getah sadapan dengan kualitas premium. Dengan tujuan pemberdayaan masyarakat, perhutani memberikan pelatihan kepada masyarakat mengenai teknik dari penyadapan getah pinus, karena kualitas getah yang bagus akan menambah harga dari getah pinus tersebut, sehingga pendapatan dari hasil sadap pun juga otomatis akan meningkat. Pelatihan penyadapan (*Job Training*) dilakukan oleh perhutani kepada masyarakat, karena kebanyakan masyarakat dalam melakukan penyadapan mengambil teknik yang mudah yang malah mengurangi kualitas dari getah pinus.⁶⁴

Program perhutanan sosial dirancang untuk memandu pengelolaan sumber daya hutan melalui kombinasi proporsional dari aspek ekonomi, ekologi, dan sosial. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan, kualitas hidup, keterampilan ekonomi dan sosial. Penguatan peran dan tanggung jawab perhutani dan masyarakat. dalam kaitannya dengan pengelolaan sumberdaya hutan, peningkatan kualitas sumberdaya hutan, produktivitas dan keamanan hutan, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan pendapatan masyarakat dan negara.

2. Perubahan pendapatan masyarakat yang mengelola lahan

Perubahan pendapatan yang dirasakan oleh masyarakat desa Kedungurang yang mengelola lahan yaitu melalui pertanian tumpangsari. Tegakan pinus memang sudah menjadi kewajiban masyarakat untuk dikelola. Namun disisi lain masyarakat juga memanfaatkan lahan dibawah tegakan tanaman dominasi untuk melakukan pertanian tumpangsari. Masyarakat desa Kedungurang yang mengelola lahan kawasan hutan lebih sering menanam tanaman berjenis ubi-ubian, jagung, dan juga Kapulaga. Dengan pertanian

⁶³ Wawancara Bapak Kadir, selaku Mandor Perhutani pada 7 Januari 2023 pukul 11.00

⁶⁴ Wawancara Bapak Kadir, Selaku Mandor Perhutani pada 7 Januari 2023 pukul 11.00

tumpangsari masyarakat desa Kedungurung melakukannya di lahan garapan mereka bisa meraup penghasilan tambahan sampai dengan Rp. 1.250.000 dalam satu kali panen. Pada umumnya masyarakat desa Kedungurung menanam kapulaga lokal, yang mana dalam satu bulan bisa panen.

masyarakat yang mengelola lahan mayoritas memanfaatkan tanaman tumpangsari dilahan garapannya, kebanyakan menanam kapulaga apabila tanaman dominasi sudah tinggi, tapi ketika pohon pinus masih pada masa penyemaian atau pembibitan tanaman tumpangsari berupa jagung, ubi-ubian. Penghasilan yang di dapat cukup besar bisa sampai Rp. 1.250.000 sehingga selain dari penyadapan pinus juga mendapatkan penghasilan dari tanaman tumpangsari.⁶⁵

Pada umumnya masyarakat desa Kedungurung mempunyai lahan garapan dikawasan hutan seluas 0,25 hektar dari 820 hektar yang didalamnya terdapat tanaman dominasi yaitu tegakan pinus. Perubahan pendapatan masyarakat desa Kedungurung yang mengelola lahan perhutani di Desa Kedungurung mayoritas dari pertanian yang menggunakan sistem tumpangsari dengan tanaman Kapulaga. Semua petani secara merata mendapatkan lahan dengan luas yang sama, akan tetapi warga bisa menambah lahan garapan dengan membeli lahan garapan orang lain, dengan dirempug secara personal oleh warga tersebut. karena ada warga yang hanya menggarap separo dari lahan yang mereka peroleh, disebabkan oleh kesibukan yang mereka miliki. Ada juga yang hanya menggarap lahannya tetapi tidak menyadap pinusnya. Disitulah terdapat musyawarah antar warga yang memperoleh lahan dari perhutani dengan warga yang tidak mendapat lahan.

ketika ada warga yang tidak mendapat lahan dari perhutani tetapi ingin menggarap bisa saja ikut menggarap, dengan berempug dengan warga yang memperoleh lahan dari perhutani. Karena masyarakat yang memperoleh lahan

⁶⁵ Wawancara Bapak Solikhin, Petani Pengelola Lahan 12 November 2022 pukul 19.00

garapan juga melalui proses yang cukup panjang, mulai dari penebangan pinus, pembibitan, perawatan, hingga pinus dilakukan penanaman, hal tersebut bukan suatu hal yang mudah dan juga menunggu waktu yang cukup lama.⁶⁶

Pemungutan getah pinus dilakukan 2 minggu, setelah dikumpulkan pada ember dan dijual pada tempat pengumpulan getah setempat. dalam 2 minggu petani meraup hasil menyadap getah 250 kg getah. pendapatan masyarakat dari penyadapan getah pinus sesuai dengan harga yang telah ditetapkan oleh perhutani. Yaitu harga getah sebesar Rp. 4000/kg.

Pendapatan masyarakat merupakan hasil kali dari jumlah getah per kilogram setelah harga ditetapkan yaitu rata-rata Rp. 2.000.000/bulan. Selama penyadapan tidak mengeluarkan biaya, karena untuk membawa getah dipikul sendiri. Adapun alat yang digunakan untuk menyadap sudah disediakan oleh perhutani.

Bagi masyarakat pengelola hutan, pekerjaan menyadap merupakan suatu sampingan, maka dari itu terkadang masyarakat pengelola hutan juga masih tetap bekerja serabutan. menyadap pinus menghasilkan penghasilan tambahan belum lagi dari tanaman tumpangsari, dari situ juga masih bisa bekerja sambil ngeplaki batu, menjadi tukang ojek.⁶⁷

Program perhutani yang melibatkan masyarakat sekitar kawasan sangat bermanfaat bagi masyarakat sekitar hutan karena dapat mengurangi tingkat pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan sosial. Hal ini dapat dilihat dari segi ekonomi, lingkungan, dan sosial.

⁶⁶ Wawancara bapak Sukaryo, selaku ketua LMDH pada 10 Desember 2022 pukul 14.00

⁶⁷ Wawancara dengan Bapak Diro selaku pengelola lahan pada 12 November 2022 pukul

D. Partisipasi Masyarakat dalam pengelolaan hutan

1. Bentuk partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Lembaga masyarakat desa hutan. adapun dalam petaninya sendiri terdapat kelompok yaitu kelompok tani sadap. Bentuk partisipasi masyarakat membentuk kontribusi yang signifikan dalam upaya menjaga kelestarian hutan. partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan sangat dibutuhkan. Terdapat aspek pembangunan berkelanjutan meliputi pemberdayaan lokal, menjadi alasan untuk menyertakan masyarakat dalam pengelolaan hutan. dalam hal ini kegiatan pengelolaan hutan dengan melibatkan masyarakat meliputi

a. Persiapan lahan

Kegiatan dalam mempersiapkan lahan sebelum melakukan penanaman tanaman pokok bermaksud untuk mempermudah dalam melakukan proses selanjutnya lahan perhutani yang ada di wilayah Kedungurug kurang lebih ada 820 Ha, dalam persiapan lahan yang nantinya akan dikelola oleh masyarakat sekitar hutan sebesar 0,25 Ha. Per orang.

b. Produksi

Produksi dari tanaman hutan berperan dari mulai pembibitan hingga memproduksi getah yang nantinya akan dipasarkan ke perhutani. Dari hasil tanaman yang dikelola oleh masyarakat sekitar, hasil produksi dari tanaman tumpangsari merupakan milik pengelola lahan, akan tetapi produksi dari getah tanaman pokok yaitu tanaman pinus dengan dijual ke TPG milik Perhutani dengan biaya per kilo getah.

c. Pengelolaan hasil

Pengelolaan hasil hutan berupa tanaman kayu dan tanaman bukan kayu, tanaman kayu berupa pohon pinus dan tanaman bukan kayu berupa tanaman palawija. Dari pengelolaan hasil hutan tersebut masyarakatlah

yang melakukan perawatan dengan mengelola lahan yang telah mereka dapatkan.

d. Pemasaran hasil

Pemasaran hasil hutan dengan melakukan penjualan getah pinus ke Perhutani melalui tempat untuk pengumpulan getah, yang mana getah tersebut nantinya akan dipasarkan ke perhutani dengan harga jual per kilo getah tergantung dari jenis getah yang diperoleh, semakin baik jenis getah yang diperoleh maka harga jual getah akan meningkat.

e. Pemanfaatan hasil

Dalam hal ini manfaat hasil dari tanaman pokok untuk kelestarian dari hutan agar tidak merusak lingkungan. pemanfaatan hasil hutan yang ada di desa Kedungurang meliputi kayu berupa pohon pinus berada dalam wilayah perhutani dan hasil bukan kayu, berupa tanaman palawija dan umbi-umbian.

Adapun bentuk partisipasi dari masyarakat meliputi:

a. Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan

Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan ini terutama berkaitan dengan segala bentuk penentuan alternatif oleh masyarakat untuk menuju kata sepakat tentang berbagai gagasan yang menyangkut kepentingan bersama. dalam pemaparan sebelumnya terkait partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, masyarakat desa kedungurang berpartisipasi melalui Lembaga masyarakat desa hutan (LMDH).

Keberadaan LMDH berjalan dengan baik sebagai representasi masyarakat desa hutan, kegiatan pertemuan rutin diadakan setiap bulan untuk membahas kegiatan-kegiatan berkenaan dengan pengelolaan hutan. sehingga dengan adanya pertemuan tersebut dapat menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya secara langsung. awalnya perhutani mengadakan pertemuan dengan petani setiap bulan sekali,

membahas terkait dengan penyadapan getah pinus, akan tetapi semakin kesini sudah jarang lagi melakukan pertemuan.

Pelaksanaan partisipasi dalam pengambilan keputusan di desa Kedungurang merujuk pada penerapan perencanaan desa partisipatif yang dilaksanakan bersama dengan msyarakat atau pihak yang berkepentingan secara konsisten dan konsekuen yang kemudian mengintegrasikan hasil perencanaan desa partisipatif dalam sistem sumberdaya hutan.

b. Partisipasi dalam pelaksanaan

Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan porgram merupakan lanjutan dari rencana yang telah disepakati sebelumnya. Baik yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, maupun tujuan.

Masyarakat berpartisipasi dalam melakukan perawatan pohon pinus mulai dari pembibitan, penyemaian, cara penanaman, hingga pinus mulai masa sadap. Adapun bentuk partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan dimulai ketika pohon pinus itu sudah layak untuk di tebang, hutan menjadi gundul disitulah masyarakat sekitar hutan memulai menggarap hutan yang gundul tersebut, dengan ditanami tanaman tumpangsari palawija seperti singkong, jagung, umbi-umbian, kacang, dan lain-lain. Setelah itu masyarakat melakukan penyemaian bibit pinus, menyiapkan lubang yang akan ditanami pohon pinus. Dan apabila pohon pinusnya sudah tinggi dan sudah layak di sadap masyarakat juga melakukan penyadapan getah pinus tersebut. selain dari perawatan bibit dalam pengawasan hutan juga masyarakat ikut untuk menjaga hutan.

bentuk partisipasi masyarakat dalam hal ini terkait dengan perawatan bibit pinus hingga pinus mulai masa sadap, pengawasan hutan juga dilakukan agar hutan terhindar dari penjarahan. Bentuk partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan, masyarakat desa Kedungurang

berpartisipasi dalam perawatan hutan, pengawasan hutan dan ikut juga dalam melindungi hutan.⁶⁸

c. Partisipasi masyarakat dalam menikmati hasil

Masyarakat desa Kedungurang dalam hal ini memperoleh penghasilan tambahan dari tanaman tumpangsari dan juga dari hasil penyadapan getah pinus. Tanaman tumpangsari yang berada dibawah tegakan pohon pinus di tanami Kapulaga lokal, dengan masa panen satu bulan sekali, selain dari itu masyarakat Kedungurang juga memperoleh tambahan penghasilan dari hasil penyadapan getah pinus, yang dalam satu bulan bisa mendapatkan 500 kg getah dikalikan dengan harga getah pinus saat ini yaitu Rp. 4.000/kg hasilnya adalah Rp. 2.000.000/bulan. Bahkan ada yang lebih Ditambah lagi dengan hasil dari tanaman tumpangsari berupa kapulaga 25 kg/bulan dikali kan harga kapulaga saat ini adalah Rp. 50.000/kg adalah Rp. 1.250.000/ bulan. Jika digabungkan maka penghasilan total dalam satu bulan adalah Rp. 3.250.000 merupakan penghasilan dari kerja di desa sudah termasuk tinggi. Itu pun juga masih bisa disambi dengan pekerjaan yang lain.

d. Partisipasi dalam Evaluasi

Partisipasi tersebut berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan hutan untuk pemberdayaan masyarakat sekitar hutan secara keseluruhan. Evaluasi yang berkaitan dengan pengelolaan hutan yang ada di desa Kedungurang berjalan dengan maksimal terutama pada saat perawatan pinus sampai dengan pinus masa sadap, masyarakat pun merasa bahwa program perhutani memiliki pengaruh besar terhadap kehidupan masyarakat sekitar.⁶⁹ Dalam hal ini partisipasi dalam evaluasi dapat

⁶⁸ Wawancara bapak sukaryo, selaku ketua LMDH pada 10 Desember 2022 pukul 14.00

⁶⁹ Wawancara dengan bapak Kadir, selaku Mandor Perhutani pada 7 Januari 2023 pukul

dikatakan baik dan sesuai dengan tujuan dari perum perhutani untuk kesejahteraan masyarakat.

E. Analisis Pengelolaan hutan untuk pemberdayaan Masyarakat

Dari hasil Pengelolaan hutan bersama masyarakat yang dilakukan merupakan program dari perhutanan sosial yang mana program tersebut bertujuan untuk kesejahteraan sosial dengan melibatkan peran serta dari masyarakat. Dalam hal ini program perhutanan sosial mengedepankan keselarasan atau keserasian agar hutan tetap lestari, dan meminimalisir konflik, walaupun pada kenyataannya terdapat konflik.

Fungsionalisme struktural menurut Talcott Parsons, merupakan suatu sistem yang memiliki hubungan timbal balik sehingga masyarakat membentuk sistem agar bisa menjaga keberlangsungan hidupnya harmonis dengan sistem lain dan bisa mengendalikan sesuatu yang menimbulkan konflik. Terdapat skema AGIL dari teori Talcott parsons yakni, adaptasi, pencapaian tujuan, integrasi, dan pemeliharaan.

Dari skema Agil yaitu fungsi Adaptasi, dalam perhutanan sosial yang ada di desa kedungurang masyarakat desa Kedungurang pada mulanya memanfaatkan sumberdaya hutan untuk keperluan hidupnya mulai dari mengambil kayu bakar dan lain sebagainya, hal ini menjadikan masyarakat terbiasa dalam pekerjaannya sebagai buruh dalam program perhutanan sosial dengan melakukan penyadapan pinus.

fungsi pencapaian tujuan, dalam fungsi pencapaian tujuan, antara negara dan masyarakat memiliki tujuan yang sama yaitu untuk kesejahteraan. Dalam hal ini perhutanan sosial memiliki tujuan untuk mensejahterahkan masyarakat melalui kekayaan dari sumberdaya yang ada, sedangkan masyarakat membutuhkan kesejahteraan untuk kebutuhan hidupnya, baik untuk sandang, pangan, maupun tempat tinggal.

Fungsi integrasi, dalam hutan milik negara tidak terjadi keselarasan dengan masyarakat karena tanaman dalam hutan milik negara merupakan tanaman

industri berupa, tanaman Jati, Pinus, akasia, dan lain sebagainya yang mana dari tanaman tersebut masyarakat tidak bisa menikmati hasil dari tanaman industri. Maka dari itu negara membentuk suatu program yang beri nama perhutanan sosial atau *social Forestry* sehingga masyarakat dapat menikmati hasil tanaman industri tersebut. dengan melakukan pemanfaatan lahan hutan ataupun hasil produksi dari tanaman industri, sehingga terjadi adaptasi.

Fungsi pemeliharaan, dari berbagai fungsi yang telah dilakukan fungsi adaptasi sudah berjalan dan program social forestry juga sudah berjalan, maka perlu adanya perawatan melalui sebuah lembaga yang nantinya dapat menjadi tujuan dari perhutanan sosial yaitu untuk kesejahteraan dengan melakukan pemberdayaan masyarakat berupa:

1. Pertanian Tanaman tumpangsari

Perhutani dalam pengelolaan hutan berbasis kepada masyarakat desa Kedungurang menggunakan model pertanian tumpangsari. Sistem pertanian tumpangsari memanfaatkan sela-sela tanaman dominasi yaitu pohon pinus dengan syarat tidak merusak dan mengganggu pertumbuhan tanaman dominasi tersebut. masyarakat desa Kedungurang mayoritas memanfaatkan adanya program pertanian sistem tumpangsari untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Banyak masyarakat yang menanam tanaman kapulaga karena memiliki nilai jual yang cukup tinggi.

Tanaman tumpangsari di Kedungurang terdapat tumpangsari pertanian dan juga tumpangsari perkebunan. Tanaman tumpangsari pertanian meliputi tanaman kacang, jagung, padi, dll. Tumpangsari pertanian dilakukan ketika pohon pinus masih dalam bibit penyemaian. Petani melakukan perawatan bibit pinus sekaligus penanaman tumpangsari pertanian, hal tersebut menjadikan petani bersemangat untuk pergi ke kebun, karena merasa memiliki tanaman yang harus mereka rawat. Adapun tanaman perkebunan dilakukan ketika bibit pinus tersebut sudah menjadi pohon yang besar. Tanaman tumpangsari berupa tanaman kapulaga. Hal tersebut juga menjadi

alasan petani untuk pergi ke kebun. selain melakukan penyadapan juga melakukan perawatan kapulaga tersebut.

2. Penyadapan getah pinus

Pohon pinus merupakan salah satu potensi didalam hutan kawasan desa Kedungurang yang dapat diambil getahnya dengan harga perkilo Rp. 4000 getah yang dihasilkan oleh pohon pinus memiliki macam-macam kualitas mulai dari 2B,2A,1B,1A, premium dan super premium. Perhutani memberikan peluang kepada masyarakat agar memanfaatkan getah pinus dengan cara menyadap dengan tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar hutan desa Kedungurang. Disisi lain perhutani juga memfasilitasi masyarakat desa Kedungurang yang akan menyadap mulai dari alat Petel, batok, ember, dan lain-lain.

Kualitas getah dalam kualitas 2A hal ini disebabkan oleh faktor cuaca dan juga tekhnik penyadapan yang dilakukan oleh masyarakat. Kualitas tersebut merupakan kualitas yang rendah dikarenakan SDM yang rendah, sehinga dalam melakukan penyadapan masyarakat desa Kedungurang mengikuti cara yang mudah dan menggunakan teknik yang penting asal keluar getah akan tetapi malah membuat kualitas getah menurun, sehingga harga getah pun juga rendah.

3. Perubahan pendapatan masyarakat

Pendapatan masyarakat pengelola lahan mengalami peningkatan selain dari hasil sadap pohon pinus, masyakat desa Kedungurang juga memanfaatkan lahan pertanian tanaman tumpangsari. Program perhutanan sosial juga dapat mengurangi tingkat pengangguran masyarakt desa Kedungurang. Petani penyadap getah pinus memiliki penghasilan bisa sampai Rp. 2.000.000 bahkan lebih setiap bulan tergantung seberapa rajin melakukan penyadapan. Belum lagi dari hasil pertanian tanaman tumpangsari dalam 1 bulan panen mencapai Rp. 1.250.000 . Penghasilan masyarakat desa Kedungurang meningkat setelah ada program perhutanan sosial di desa

Kedungurang. Mulai dari penghasilan penyadapan getah 1 bulan mencapai Rp. 2.000.000 ditambah dengan hasil tanaman tumpangsari dalam 1 bulan Rp. 1.250.000, jika dijumlahkan maka pendapatan masyarakat pengelola lahan hutan perhutani mencapai Rp. 3.250.000/bulan. Sudah cukup lumayan untuk kehidupan sehari-hari para petani pesanggem.

F. Analisis Partisipasi Masyarakat dalam pengelolaan hutan

Partisipasi masyarakat merupakan sumberdaya sosial yang memiliki peran yang sangat penting dalam mensukseskan suatu program pembangunan. Partisipasi masyarakat dalam program perhutanan sosial mengenai sosialisasi, pelaksanaan, dan juga menikmati hasil. Partisipasi mengenai sosialisasi meliputi rencana program perhutanan sosial melalui Lembaga Masyarakat Desa Hutan yang menjadi wadah bagi masyarakat untuk mengeluarkan aspirasinya.

Partisipasi masyarakat mengenai pelaksanaan dalam perhutanan sosial meliputi pelatihan-pelatihan mengenai perawatan bibit pinus hingga pohon pinus telah tiba masa penyadapan. Dan juga mengenai tanaman dibawah tegakan yang tidak merusak pohon dominasi, sehingga masyarakat dapat teredukasi mengenai jenis tanaman yang tidak mengganggu tanaman dominan.

Partisipasi dalam pemanfaatan hasil dalam program perhutanan sosial melalui program tanaman tumpangsari dan juga hasil dari penyadapan getah, yang mana masyarakat dapat menikmati hasilnya dari kegiatan partisipasi yang telah mereka lakukan dalam program perhutanan sosial.

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan sangat diperlukan karena sebagai upaya masyarakat dalam melaksanakan suatu kegiatan. Dengan melibatkan masyarakat sekitar akan mempermudah dalam pelaksanaan program perhutanan sosial, karena pada kehidupan sehari-hari masyarakat yang hidupnya berada di sekitar hutan sudah sering berinteraksi dengan hutan. maka dari itu akan lebih mempermudah dalam melakukan program perhutanan sosial.

Partisipasi dalam Evaluasi mengenai program perhutanan sosial dapat dikatakan terealisasi mengenai tujuan utama dari program tersebut yakni

mensejahterakan masyarakat sekitar hutan, dengan menjalankan program-program yang ada.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dipaparkan pada bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan bahwa konsep pengelolaan hutan untuk pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial merupakan bentuk kepedulian pemerintah kepada masyarakat melalui perhutanan sosial untuk mensejahterakan masyarakat melalui pola pemberdayaan dengan melibatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pengelolaan hutan.

Partisipasi masyarakat menjadi titik utama dalam pelaksanaan perhutanan sosial, dengan tujuan dari pelaksanaan pengelolaan hutan untuk kemakmuran masyarakat sekitar. Mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan juga dalam hal menikmati hasil. hal tersebut disimpulkan sebagai berikut:

1. Pemberdayaan masyarakat yang ada di desa Kedungurang melalui pengelolaan hutan dengan adanya program perhutanan sosial berupa, tanaman tumpangsari dan juga pemanfaatan tanaman industri yang dengan melakukan penyadapan getah pinus.
2. Masyarakat meningkat pendapatannya dengan adanya sistem perhutanan sosial, dapat dilihat dari segi ekonominya.
3. Partisipasi masyarakat desa Kedungurang yang terjalin dengan perhutani melalui LMDH sudah cukup baik dalam hal program perhutanan sosial dimulai dari perawatan bibit pinus sampai dengan pinus besar dan masa sadap.
4. Dengan melibatkan partisipasi dari masyarakat program perhutanan sosial dapat mengurangi pengangguran.

B. Saran

Dari penelitian yang telah dilakukan, peneliti memiliki beberapa saran yang akan disampaikan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas produksi mengenai penyadapan getah pinus menjadi fokus utama dalam meningkatkan pendapatan maka dari itu teknik penyadapan getah lebih diperhatikan lagi bagi petani pesanggem agar sesuai dengan teknik yang perhutani inginkan dan mendapatkan kualitas getah yang bagus.
2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan mengenai hal produksi maka perhutani harus lebih meningkatkan komunikasinya dengan masyarakat sekitar hutan melalui sosialisasi agar masyarakat merasa lebih tersentuh dan bersemangat dalam melakukan penyadapan getah. Dalam tipologi partisipasi masyarakat, masyarakat berada pada tingkatan manipulasi yang mana tingkatan tersebut merupakan tingkatan terendah.



DAFTAR PUSTAKA

- Adnan, Hasantoha Dan Berliana, Hasbi. 2018. *Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kemitraan Kehutanan*. Jakarta: Kemitraan Partnership.
- Anggito Albi Dan Setiawan Johan. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: Cv. Jejak.
- Arifandy, M. Imam Dan Sihaloho, Martua. 2015. *Efektivitas Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat Sebagai Resolusi Konflik Sumberdaya Hutan*, Dalam *Jurnal Sosiologi Pedesaan*.
- Arischa Suci. 2019. Analisis Beban Kerja Bidang Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Pekanbaru. Dimuat Dalam *Jurnal Jom Fisip*. Vol.6.
- Dewi Indah Novita. 2018. *Kemiskinan Masyarakat Sekitar Hutan Dan Program Perhutanan Sosial*. Dimuat Dalam *Jurnal Info Teknis Eboni*. Vol.15. No.2.
- Endah Kiki. 2020. *Pemberdayaan Masyarakat: Menggali Potensi Lokal Desa*. Dimuat Dalam *Jurnal Moderat*. Vol. 6. No.1.
- Firmansyah M. Dan Gunawan Diah Setyorini. 2007. Antara Pembangunan Ekonomi Dan Degradasi Lingkungan Dimuat Dalam *Jurnal Eko- Regional*. Vol. 2. No.2.
- Hakim, Ismatul. *Social Forestry Menuju Restorasi Pembangunan Kehutanan Berkelanjutan*. Bogor: Pusat Penelitian Dan Pengembangan Perubahan.
- Hamid, Hendrawati. 2018. *Manajemen Pemberdayaan Masyarakat*. Makasar: Della Maca.
- Handono Setiyo Yuli, Hidayat Kliwon, Dan Purnomo Mangku. 2020. *Pemberdayaan Masyarakat Pertanian*. Malang: Ub Press.
- Herdiawanto Heri Dan Hamdayama Jumanta. 2021. *Dasar-Dasar Penelitian Sosial*. Jakarta: Kencana.
- [Httts://Kbbi.Web.Id/Kelola.Html](https://Kbbi.Web.Id/Kelola.Html), Diakses Pada 1 Juli 2021.
- Huaerah Abu Dan Melawati Mety. 2008. *Pengorganisasian Dan Pengembangan Masyarakat Model Strategi Pembangunan Berbasis Kerakyatan*. Indonesia: Humaniora.

- Kusumaningtyas Rahajeng Dan Chofyan Ivan. Pengelolaan Hutan Dalam Mengatasi Alih Fungsi Lahan Hutan Di Wilayah Kabupaten Subang. Dimuat Dalam *Jurnal Perencanaan Wilayah Kota*. Vol.13. No. 2.
- Liani Meita Four, Roslinda Emi, Dan Muin Sudirman. Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Hutan Adat Di Dusun Sungai Utik Desa Batu Lintang Kecamatan Embaloh Hulu Kabupaten Kapuas Hulu. Dalam *Jurnal Hutan Lestari*. Vol.4.
- Maryani Dedeh Dan Nainggolan Ruth Roselin E. 2019. Pemberdayaan Masyarakat. Yogyakarta: Cv Budi Utama.
- Mujaffar Ahmad. 2020. *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Hutan*. Lombok: Forum Pemuda Aswaja.
- Muliawan Andi Pratiwi Dan Balkis Syarifah. 2020. Pengaruh Kontribusi Pendapatan Penyadap Getah Pinus Terhadap Kesejahteraan Ekonomi Di Desa Bolli Kecamatan Ponre Kabupaten Bone. Dimuat Dalam *Jurnal Social Landscape*.
- Noor Munawar. *Pemberdayaan Masyarakat*. Dimuat Dalam *Jurnal Ilmiah Civis*. Vol. 1. No. 2.
- Nurbaiti, Siti Robiah Dan Bambang, Azis Nur. 2017. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Program Corporate Social Responsibility (Csr)*. Dimuat Dalam Proceeding Biology Education Conference.
- Octavia Dona, Yeny Irma Dangingoga dan Kirsfianti L. 2012. *Pengelolaan Hutan Secara Partisipatif Menuju Kph Hijau Untuk Mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan*. Yogyakarta: Cv Budi Utama.
- Peranginangin Lily Sri Ulina. 2014. Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Kawasan Konservasi. *Jurnal Kebijakan & Administrasi Publik Jkap*. Vol. 18. No.1.
- Pratiwi Nuning Indah. 2017. Penggunaan Media Video Call Dalam Teknologi Komunikasi. Dimuat Dalam *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*. Vol. 1. No.2.
- Rahmat Pupu Saefulah. 2019. Penelitian Kualitatif. Dimuat Dalam *Jurnal Equilibrium*. Vol. 5. No. 9.
- Ramadhan Dasrul. 2016. Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Hutan Rakyat Di Desa Paccaramengan Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba.

Skripsi: *Kehutanan*, Fakultas Pertanian, Universitas Muhammadiyah Makassar.

- Safitri Faradil Dan Nuraina Elva. 2017. Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Madiun. Dimuat Dalam *Jurnal Equilibrium*. Vol. 5. No.1.
- Sahureka Mersiana. 2016. Pemanfaatan Lahan Dan Pengelolaan Sumberdaya Hutan Oleh Masyarakat Sekitar Kawasan Hutan Lindung Gunung Sirimau (Studi Kasus Di Desa Hukurila Kota Ambon). Dimuat Dalam *Jhppk*, Issn Online2621-878.
- Sany Ulfi Putra. 2019. Prinsip-Prinsip Pemberdayaan Masyarakat Dalam Persepektif Al-Qur'an. Dimuat Dalam *Jurnal Ilmu Dakwah*.Vol.39. No. 1.
- Setiawan Dedy, Hardiansyah Gusti, Dan Widhanarto Ganjar Oki. *Identifikasi Dampak Pengelolaan Hutan Desa Terhadap Peningkatan Ekonomi Masyarakat Bentang Pesisir Padang Tikar Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya*. Dalam *Jurnal Hutan Lestari*. Vol. 9.
- Siti Ikramatoun. Khairulyadi Dan Riduan. 2020. Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Hutan Pinus Di Kecamatan Linge Aceh Tengah. Dimuat Dalam *Jurnal Sosiologi Agama Indonesia*. Vol.1.
- Siyoto Sandu Dan Sodik M. Ali. 2015. Dasar Metodologi Penelitian. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.
- Sondak Sandi Hesti, Taroreh Rita N, Dan Uhing Yantje. 2019. Faktor-Faktor Loyalitas Pegawai Di Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Dimuat Dalam *Jurnal Emba*. Vol. 7. No.1.
- Sriyana. 2021. *Masalah Sosial Kemiskinan, Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Sosial*. Malang: Cv. Literasi Abadi.
- Subandi. 2011. Deskripsi Kualitatif Sebagai Satu Metode Dalam Penelitian Pertunjukan. Dimuat Dalam *Jurnal Harmonia*. Vol. 11. No. 1.
- Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sulpiana. 2019. Pengelolaan Sumber Daya Alam (Lada) Berbasis Kearifan Lokal Dipesisir Danau Towuti Kabupaten Luwu Timur. Skripsi: *Ekonomi Syariah*, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Iain Palopo.

Turama, Akhmad Rizki. *Formulasi Teori Fungsionalisme Struktural Talcott Parsons*, Universitas Sriwijaya.

Ummah Habibatul. 2021. Pemberayaan Masyarakat Berbasis Hutan Kemasyarakatan Dalam Upaya Pelestarian Lingkungan Di Desa Karang Jaya Kecamatan Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan. Skripsi: *Pengembangan Masyarakat Islam*. Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi, Uin Raden Intan Lampung.

Undang-Undang No 23 Tahun 2021 Pasal 1 Dan 64.

Widyanto Adi, Mulatsih Sri, Dan Karlinasari Lina. Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pelestarian Hutan Dan Pertanian Berkelanjutan Di Sekitar Suaka Margasatwa Karakelang, Sulawesi Utara. Dimuat Dalam *Journal Of Natural Resources And Environmental Management*.

Witno, Maria, Dan Dicky Supandi. 2020. *Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (Hkm) Tandung Billa Di Kelurahan Battang Kota Palopo*. Dimuat Dalam Jurnal Penelitian Kehutanan Bonita.

Yuliani Shahibah Dan Herminasari Nova Scoviana. 2017. Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Hutan Mangrove Di Desa Segaraja, Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi. Dimuat Dalam *Jurnal Green Growth Dan Manajemen Lingkungan*. Vol. 6. No. 2.



PEDOMAN WAWANCARA

1. Ketua Lembaga Masyarakat Desa Hutan “Wana Makmur”
 - a. Bagaimana sejarah adanya perhutanan sosial di desa Kedungurang?
 - b. Bagaimana pembentukan kepengurusannya?
 - c. Berapa jumlah petani penyadap?
 - d. Bagaimana proses pelaksanaan program perhutanan sosial di desa Kedungurang?
2. Pihak perum perhutani
 - a. Bagaimana partisipasi masyarakat desa kedungurang?
 - b. Bagaimana pemberdayaan yang dilakukan oleh perhutani?
 - c. bagaimana jenis getah pinus yang diinginkan perhutani?
 - d. Apakah ada kendala terkait dengan masyarakat pesanggem?
3. Pengelola lahan
 - a. Bagaimana tanggapan anda mengenai program perhutanan sosial di desa Kedungurang?
 - b. Apakah program perhutanan sosial dapat meningkatkan kesejahteraan dimasyarakat?

DOKUMENTASI

Tanaman Pinus



Wawancara dengan ketua LMDH



, Kedungurang, kec. Gumelar, Jawa Tengah

Tempat pengumpulan Getah



Lahan yang sudah ditebang



Penyadapan getah pinus



Tanaman kapulaga dibawah tegakan Pinus



Alat untuk menampung getah sebelum dibawa ke TPG



Wawancara dengan Pihak Perhutani



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Laeli Nur Wigati
Tempat, tanggal lahir : Banyumas, 26 Desember 1998
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Nama Ayah : Disman
Nama Ibu : Daryati
Alamat : Kedungurang Rt 005/001, Gumelar, Banyumas
Email : laeliwigati@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal

- a. TK MNU Diponegoro 167 Kedungurang
- b. Mi Ma'arif Nu 1 Gancang
- c. Mts Ma'arif Nu 1 Gumelar
- d. Smk Ma'arif Nu 1 Ajibarang
- e. S1 UIN PROF. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto (Dalam Proses)

Purwokerto, 13 Januari 2023



Laeli Nur Wigati
NIM. 1617104025